



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PROVINSI RIAU 2018



Pemerintah Provinsi Riau



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Riau kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Kinerja Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau yang dijabarkan melalui Sasaran Strategis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun mendatang.

Pekanbaru, Maret 2019





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berusaha untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing sasaran berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 (tujuh) indikator capaiannya Sangat Baik, sedangkan 13 (tiga belas) indikator capaiannya Baik, 2 (dua) indikator capaiannya Kurang, 2 (dua) indikator tidak dapat diukur capaiannya karena datanya tidak tersedia (n/a). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2018 adalah sebesar **89,67%** atau kategori **Baik**.



DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Wilayah	1
1.2. Potensi Wilayah	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Kinerja	7
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III ANALISIS KINERJA ...14	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	19
3.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	28
3.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	33
3.1.4. Sasaran 4 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Kesenjangan	37
3.1.5. Sasaran 5 : Menurunnya Angka Pengangguran	45
3.1.6. Sasaran 6 : Terwujudnya good governance and clean government	48



3.1.7. Sasaran 7 : Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal.....	61
3.1.8. Sasaran 8 : Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama ..	66
3.1.9. Sasaran 9 : Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan).....	70
3.1.10. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup...	78
3.1.11. Sasaran 11 : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing.....	84
3.1.12. Sasaran 12 : Meningkatnya Nilai Investasi.....	88
3.1.13. Sasaran 13 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	91
3.2. Realisasi Anggaran.....	96
BAB IV PENUTUP	104
4.1. KESIMPULAN	104
4.2. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA DI MASA MENDATANG	107

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Isi	Halaman
1.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	1
2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Pada Setiap Misi ...	10
3.1. Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	17
3.3. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 1	19
3.4. Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Riau	26
3.5. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 2	28
3.6. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 - 2017	29
3.7. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 - 2017	31
3.8. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 3	33
3.9. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 4	38
3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Se-Sumatera dan Nasional September-2018	40
3.11. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2018	40
3.12. Gini Ratio Menurut Provinsi Se-Sumatera Tahun 2017-2018	43
3.13. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 5	45
3.14. Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 6	49
3.15. Skor LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau 2012-2016	53



3.16.	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau Tahun 2018	55
3.17.	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Tahun 2018.....	58
3.18.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Riau tahun 2017	60
3.19.	Hasil Survey Pelaksanaan RB Provinsi Riau tahun 2017	60
3.20.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 7	64
3.21.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 8	68
3.22.	Daftar Konflik Agama di Provinsi Riau Tahun 2018	69
3.23.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 9	72
3.24.	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	73
3.25.	Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor di Provinsi Riau Tahun 2018....	76
3.26.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 10	80
3.27.	Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2018.....	82
3.28.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 11	87
3.29.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 12	90
3.30.	Pengukuran Kinerja – Sasaran Strategis 13	93
3.31.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	95
3.32.	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	100



Gambar

Isi	Halaman
1.1. Peta Provinsi Riau	2
1.2. Peta Geografis Provinsi Riau	4
2.1. Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019	8
3.1. Pembangunan SPAM Regional untuk mendukung penyediaan air minum bagi masyarakat.....	22
3.2. Plt Gubri H Wan Thamrin Hasyim Tinjau Progres Pembangunan TOL Pekanbaru Dumai dan Jembatan Siak IV	25
3.3. Kegiatan Pemasangan Tiang Listrik di Desa Sungai Mintan, Kabupaten Indragiri Hilir	28
3.4. Gubernur Riau H. Arsyadjulindi Rachman meresmikan gedung baru SMA Negeri 4 Pekanbaru.....	33
3.5. Gubri H Arsyadjulindi Rachman beserta Isteri meninjau pelaksanaan Imunisasi saat hadir Pencanangan Kampanye Measles Rubella (MR), di SD 002 Senapelan Pekanbaru	37
3.6. Gubri H Arsyadjulindi Rachman menyerahkan Rumah Layak Huni kepada Masyarakat saat Peresmian 4 Jembatan di Kec Rokan IV Koto kab Rohul	44
3.7. Plt. Gubri H. Wan Thamrin Hasyim menerima piagam WTP tahun 2017 dan FGD Pelaksanaan DAK tahun 2018, di ruang Rapat Auditorium Lt.8 Gedung Menara Lancang.....	51
3.8. Gubernur Riau H. Arsyadjulindi Rachman mencanangkan penguatan Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu di Provinsi Riau	67
3.9. Gubri H Wan Thamrin Hasyim di dampingi Bupati Rohil mengendarai traktor saat Panen Raya Padi, di Kepenghuluan Pematang Silek, Kec. Rimba Melintang – Rokan Hilir	77
3.10. Gubernur Riau H Arsyadjulindi Rachman menerima Penghargaan Riau Bebas Asap dari BNPB Pusat saat Apel Pagi Bersama sekaligus Pengarahan kepada ASN dilingkungan Pemprov Riau, di Halaman Kantor Gubernur	86
3.11. Gubri H Arsyadjulindi Rachman didampingi Bupati, Wakil Bupati Kab Kuansing dan Forkopinda memukul Gong tanda Pembukaan Pesta Rakyat Kuantan Singingi “Festival Pacu Jalur Tradisional Tahun 2018”, di Lapangan Limuno Kuansing	90



Grafik

Isi	Halaman
3.1. Data Kondisi Jalan Provinsi (Km) di Provinsi Riau	23
3.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2014-2017	30
3.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2014-2017	31
3.4. Angka Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2014-2017.....	34
3.5. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau, September 2014-September 2018.....	39
3.6. Rasio Gini Provinsi Riau Dari Tahun 2013 – 2018.....	42
3.7. Persentase Pengangguran Terbuka Provinsi Riau 2005-2018	46
3.8. Skor LPPD Pemerintah Provinsi Riau.....	53
3.9. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2015-2017	62
3.10. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau 2014-2018	76
3.11. Perbandingan Indek Kualitas Lingkungan Hidup per Provinsi Sumatera, 2017	83
3.12. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2018	88



BAB
1

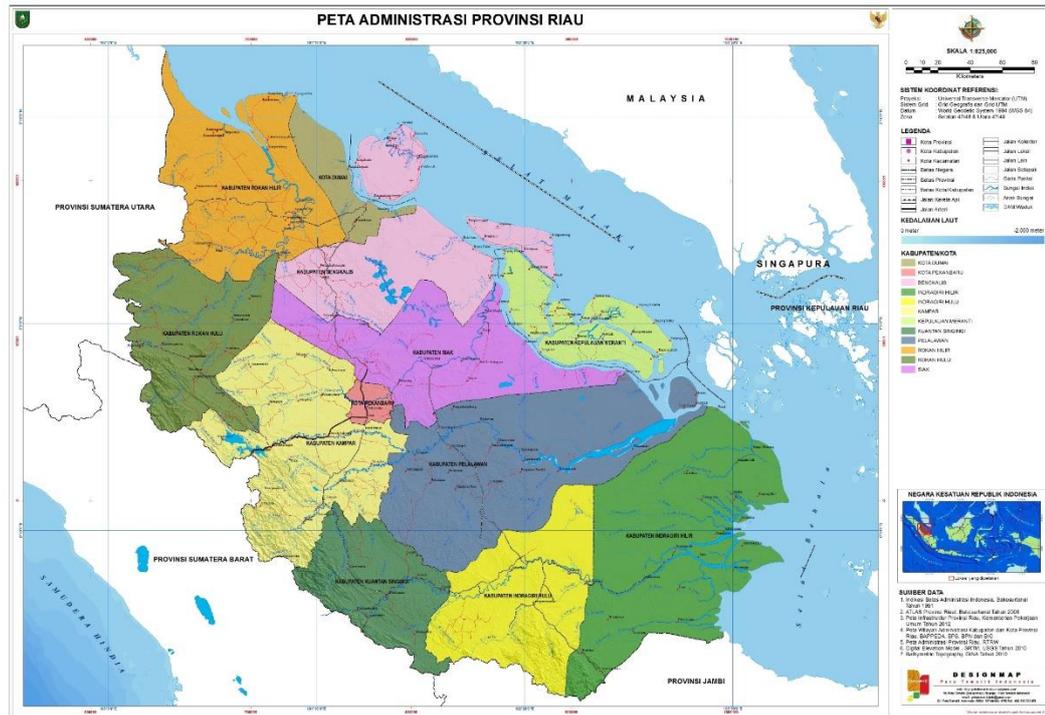
PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum Provinsi Riau meliputi kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau. Kondisi geografi Provinsi Riau yang dianalisis meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah dan potensi pengembangan wilayah.

1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas wilayah Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 90.128,76 Km², dimana terdiri dari 89.083,57 Km² luas daratan dan 1.045,19 Km² luas lautan atau perairan. Nama-nama masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1. Peta Provinsi Riau

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara Tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah Kabupaten/Kota ditunjukkan Tabel 1.1 serta letak masing-masingnya wilayah lihat pada Gambar 1.2.



Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Riau

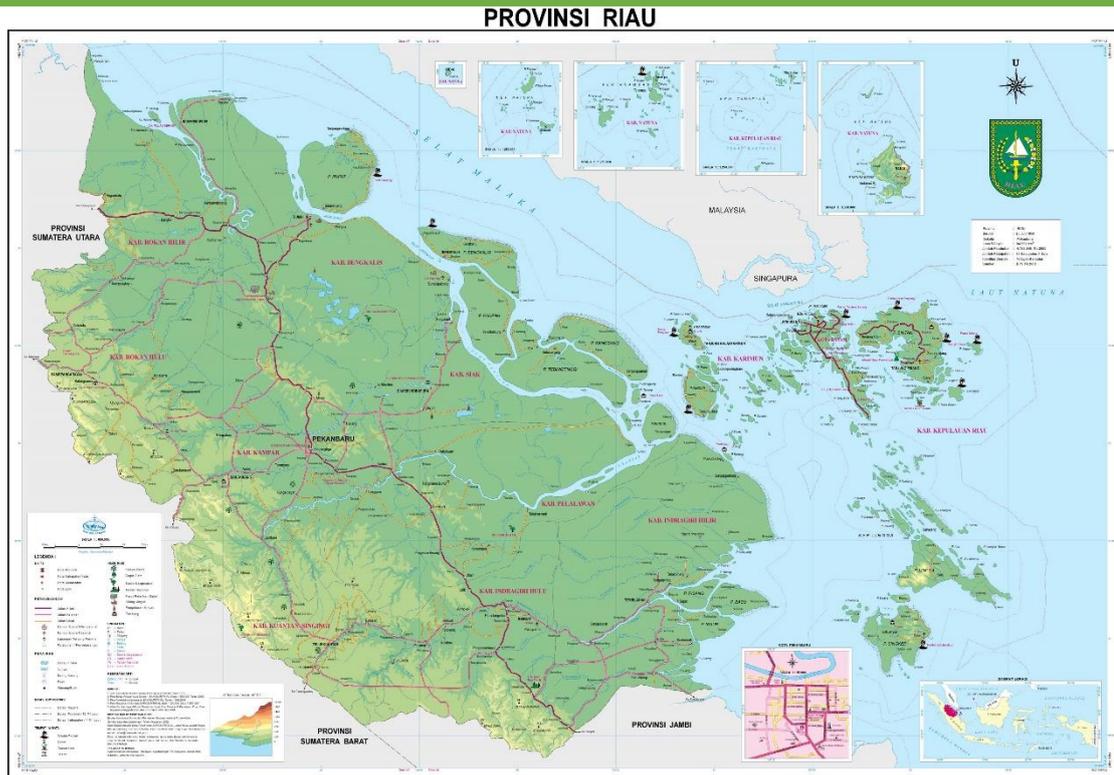
No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (Ha)
1	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	752.743,28
2	Kampar	Bangkinang	1.089.721,66
3	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	527.273,74
4	Indragiri Hulu	Rengat	797.816,84
5	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.346.589,47
6	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.302.018,65
7	Siak	Siak Sri Indrapura	784.396,97
8	Bengkalis	Bengkalis	852.043,63
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-Api	915.472,45
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	363.679,18
11	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	63.340,30
12	Kota Dumai	Dumai	217.779,79
	JUMLAH		9.012.875,96

Sumber : Riau Dalam Angka, 2018

1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dan antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka (Gambar 2.3).

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis tersebut adalah berada di jalur perdagangan internasional, Selat Malaka, dekat dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand.



Gambar 1.2. Peta Geografis Provinsi Riau

1.2. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, industri, perkebunan dan lain-lain. Pengembangan potensi yang ada akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau.

1.2.1. PARIWISATA

Provinsi Riau memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Saat ini Provinsi Riau masih mengembangkan potensi wisata secara maksimal termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara serta memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau. Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau antara lain :

1. Wisata Bono, di Kabupaten Pelalawan;
2. Candi Muara Takus, di Kabupaten Kampar;
3. Pacu Jalur, di Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Festival Bakar Tongkang, di Kabupaten Rokan Hilir;



5. Istana Siak Sri Indrapura, di Kabupaten Siak.
6. Kawasan Wisata Pulau Rupa, di Kabupaten Bengkalis.
7. Pantai Solop, di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2.2. KAWASAN INDUSTRI

Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri di Provinsi Riau yang sangat perlu mendapatkan dukungan infrastruktur yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak dan Kawasan Industri Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2.3. PERKEBUNAN

Sesuai dengan kondisi kesuburan lahan, jenis lahan dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budi daya tanaman perkebunan disamping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan. Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Pengolahan kelapa sawit dan kelapa serta pengolahan minyak perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh oleh Provinsi Riau. Pengembangan industri pengolahan kelapa ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riau tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

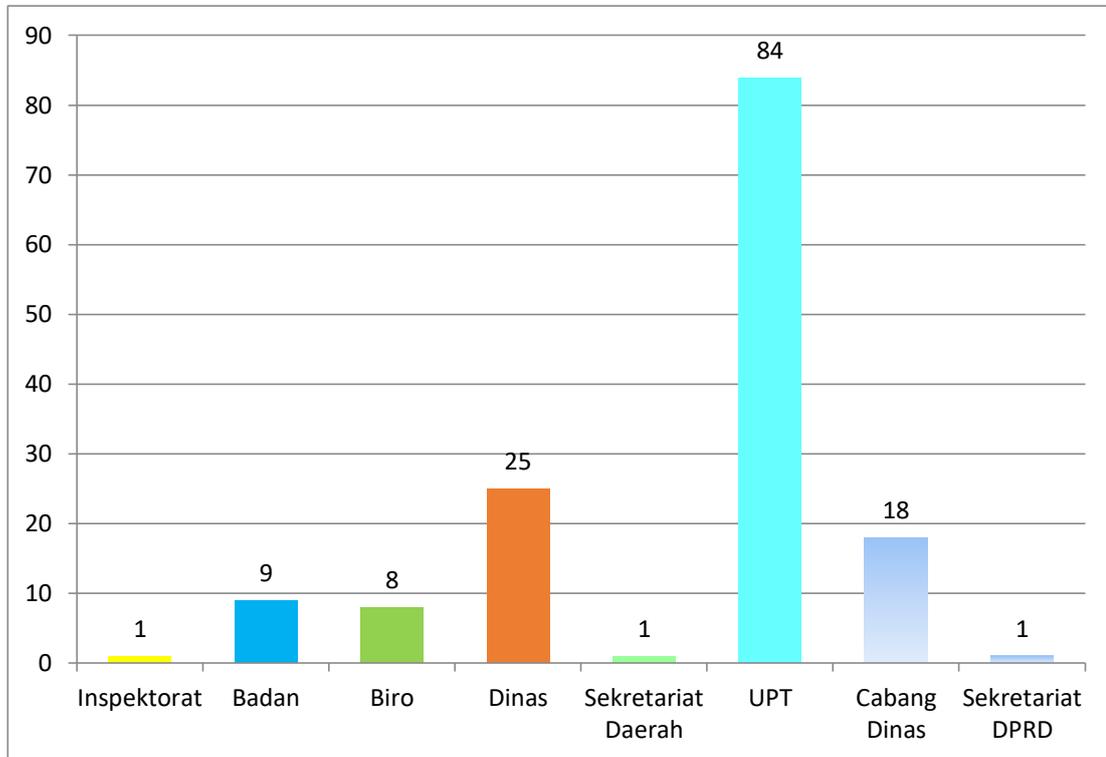
1.3 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat jumlah lembaga pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

Grafik 1.1. Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2018



Sumber: Biro Organisasi Provinsi Riau 2019



BAB
2

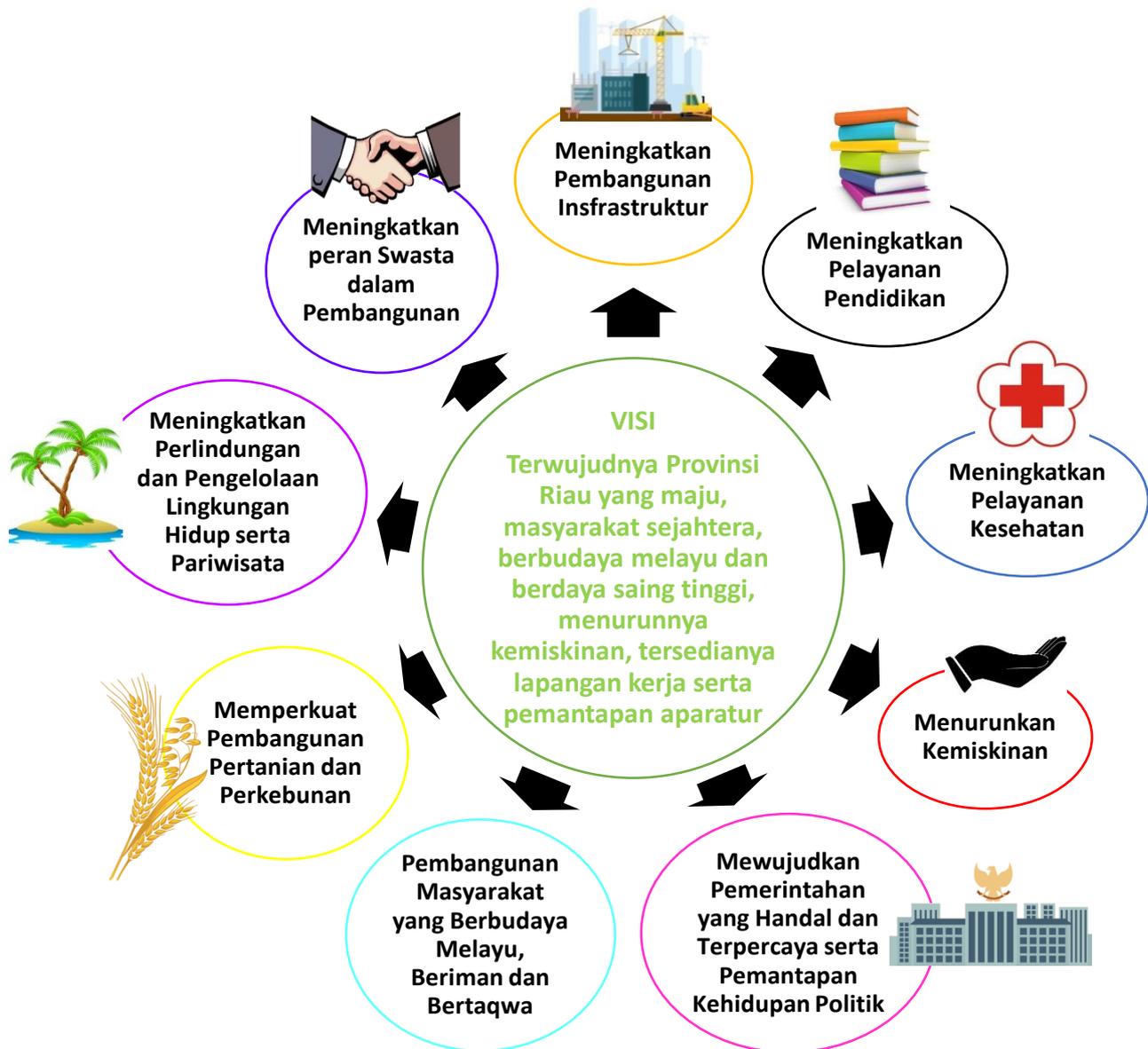
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama serta Perjanjian Kinerja sebagai referensi pengukuran kinerja pemerintah Provinsi Riau.



Gambar 2.1. Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019

2.1.1. VISI DAN MISI PROVINSI RIAU

2.1.1.1. Visi Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan ketiga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 s.d. 2019. Visi Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 s.d. 2019 yang tercantum yaitu :

“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur ”

2.1.1.2. Misi Provinsi Riau

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah.

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

2.1.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk tercapainya Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan pembangunan Provinsi Riau. Tujuan pembangunan Provinsi Riau adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dari pembangunan akan dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan potensi, sumber daya dan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, Pemerintah Provinsi Riau telah merumuskan sasaran strategis. Sasaran



strategis merupakan prioritas pembangunan yang akan dicapai setiap tahunnya melalui pelaksanaan anggaran pembangunan Provinsi Riau. Berikut merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau pada setiap Misi.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Pada Setiap Misi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan
3	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Menurunkan Kemiskinan	Menurunkan Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat Menurunnya angka pengangguran
5	Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik	Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>
6	Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa	Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Meningkatnya kerukunan hidup beragama
7	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
8	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pariwisata	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing
9	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.	Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.	Meningkatnya nilai investasi
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

2.1.1.4. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis Provinsi Riau antara lain :

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Kuantitas Infrastruktur yang Berkualitas
3. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
4. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Perbaikan Iklim Usaha, Investasi dan Peningkatan Daya saing Perekonomian
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan



8. Peningkatan Penerapan Nilai Budaya Melayu dan Agama Pada Masyarakat
9. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihimpun kedalam 3 aspek ;

1. Kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

- a. Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

Permasalahan utama adalah:

- 1) Kontribusi sektor dengan migas dimana sektor pertambangan dan penggalian harga konstan di dalam PDRB Riau mengalami penurunan sebanyak 5,53% per tahun. Sementara kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas harga konstan turun sebanyak 1,02%.
- 2) Rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian pada semua sub sektor (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kehutanan).
- 3) Belum berkembangnya industri pengolahan hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut dengan migas.
- 4) Rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian *non-tradable*, hal ini tergambar dari kontribusi sektor jasa.
- 5) Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif, namun sudah terjadi perbaikan pengendalian angka inflasi.
- 6) Terjadinya peningkatan angka kemiskinan.

2. Kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga

- a. Kesejahteraan Sosial

Permasalahan utama adalah :

- 1) Masih rendahnya IPM Provinsi Riau



- 2) Belum optimalnya perluasan jaringan dan perluasan lapangan kerja terdidik/terampil.
- b. Seni Budaya dan Olahraga
Permasalahan utama adalah :
 - 1) Peran masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya melayu belum optimal
 - 2) Belum semua wilayah memiliki sarana dan prasarana pendukung pengembangan budaya melayu
 - 3) Penerapan nilai-nilai melayu yang Islami belum melembaga karena belum terintegrasinya antara pendidikan agama dengan kurikulum yang memasukkan unsur budaya melayu dalam pembelajaran
 - 4) Prestasi olahraga yang belum menunjukkan pengaruh yang signifikan karena belum optimalnya pemanfaatan fasilitas olahraga
3. Pelayanan umum yang terdiri dari:
 - a. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial
 - b. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar meliputi: Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Kebudayaan, serta Perpustakaan
 - c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, serta Transmigrasi
 - d. Fokus Penunjang Urusan meliputi: Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian serta Diklat, Litbang, Lainnya (Otonomi Daerah)



4. Daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari RKPD tahun 2018 dengan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2018. Perjanjian kinerja tersebut menjelaskan target secara kuantitatif pada setiap indikator kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam tahun 2018.

Dokumen perjanjian Kinerja Provinsi Riau merupakan dokumen perjanjian kinerja antara Gubernur Riau dengan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.



BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang
5	0	Data Tidak Ada/ Tidak Lengkap



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara NOMOR : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi Dalam kondisi sebagai berikut.

- 1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- 2) makin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 telah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Persentase Perbandingan terhadap Capaian terhadap Tahun 2017 dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Perbandingan terhadap Capaian Thn 2018} = \frac{\text{Realisasi 2018} - \text{Realisasi 2017}}{\text{Realisasi 2017}} \times 100 \%$$

Persentase Capaian terhadap Target Akhir Renstra dihitung dengan rumus sebagai berikut:



$$\% \text{ Capaian terhadap Target Akhir RPJMD} = \frac{\text{Realisasi 2018}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

Catatan: Rumus berlaku untuk indikator dengan data kuantitatif yang bersifat kumulatif

Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 dengan 13 sasaran strategis dan 24 indikator yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	Persen	91,65 %	68,43 %	74,66 %	Baik
		panjang jalan dalam kondisi baik	Km	1.615,08 Km	1.065,52 Km	65,97%	Cukup
		Rasio Elektrifikasi	Persen	85,83	90,63	105,59%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	8,67	8,76*	101,04%*	Sangat Baik
		Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,43	13,03*	97,02%	Baik
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,33	70,99*	99,52%*	Baik
4.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,35	7,39	83,62%	Baik
		Gini Rasio	Indeks	0,35	0,330	105,71%	Sangat Baik
5.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.68	6.20	107,19%	Sangat Baik



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Terwujudnya good governance and clean government	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP*	100%*	Baik
		Nilai Akuntabilitas	Predikat	BB	B	95,73%	Baik
		Skor LPPD	Indeks	3,53	2,6994*	76,47%*	Baik
		Nilai Keterbukaan Informasi	Indeks	46,49	45,43	97,72%	Baik
		Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	39,60	52,88*	133,54%*	Sangat Baik
7.	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	Angka	60	-	n/a	Data tidak ada/ tidak lengkap
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu Sesuai Standar	Angka	150	-	n/a	Data tidak ada/ tidak lengkap
8.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	Persen	100%	100%	100%	Baik
9.	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	24,88	22,44	90,19%	Baik
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	105.55	92.70	87.83%	Baik



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,10	63,93*	106,37%*	Sangat Baik
11.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah Kunjungan wisatawan asing	Jiwa	79.227 Jiwa	146.935 jiwa	185,46%	Sangat Baik
12.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	milyar rupiah	11.200,31	9.055,39	80,85%	Baik
		Nilai Investasi PMA (juta USD)	juta USD	1.067,21	1032,88	96,78%	Baik
13.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,73	2,34	62,73%	Cukup
Rata-rata Capaian Kinerja 2018						89,67%	Baik

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar diukur melalui indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum, panjang jalan dalam kondisi baik, dan rasio elektrifikasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ralisasi Kinerja 2017	Realiasi Kinerja 2018			% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	86,69	91,65	68,43	74,66%	72,84%
	Panjang jalan dalam kondisi baik	1.384,43	1.615,08	1.065,52	65,97%	65,14%
	Rasio elektrifikasi	83,79	85,83	90,63	105,59%	103,78%



1. Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum

Indikator kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum tahun 2018 adalah 68,43% dengan capaian kinerja sebesar 74,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah menurun dari sebelumnya 18,26%. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa Kendala dan permasalahan yang mempengaruhi ketercapaian Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum adalah sebagai berikut.

1. Masih lemahnya komitmen dan instrumen kebijakan serta strategi pembangunan air minum di Provinsi Riau yang berakibat menurunnya penyediaan air minum di provinsi.
2. Menurunnya persentase cakupan pelayanan air minum juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
3. Tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan mengakibatkan turunnya pelayanan air minum di Provinsi Riau sehingga jauh tertinggal dari apa yang telah dicapai di skala nasional.
4. Belum optimalnya manajemen pelaksanaan oleh rekanan terutama terhadap pemanfaatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu pelaksanaan tidak efisien.
5. Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui :

1. Melakukan pengembangan SPAM Regional untuk mendukung capaian air minum khususnya bagi Kabupaten/Kota yang kesulitan air baku mengingat Riau dilintasi oleh empat sungai besar (Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengalir banyak wilayah;
2. Meningkatkan kinerja PDAM dan UPT Air Minum;



3. Meningkatkan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk: pertemuan secara periodik; *show case meeting* secara berjenjang ;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna;
5. Mempercepat proses pengadaan barang jasa, agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 72,84%, mengingat tipe perhitungan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum bersifat kumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 93,94%.

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum adalah Rp 82.208.136.648,- atau 70,40% dari total pagu anggaran Rp 116.777.812.300,- hal itu menunjukkan adanya efisiensi sebesar 29,60% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasi dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum diantaranya :

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
2. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
5. Program Perencanaan Tata Ruang



Gambar 3.1. Pembangunan SPAM Regional untuk mendukung ketersediaan air minum bagi Masyarakat

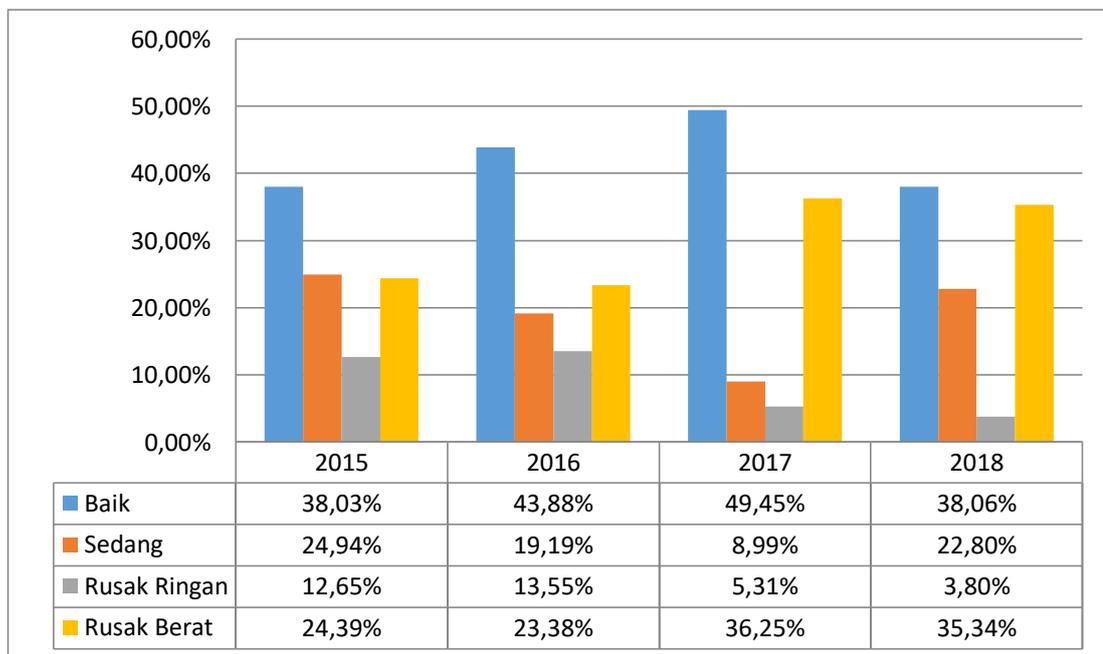


2. Indikator kinerja Panjang jalan dalam kondisi baik

Indikator kinerja Panjang jalan dalam kondisi baik Tahun 2018 adalah 1.065,52 Km dari target 1.615,08 Km dengan capaian kinerja sebesar 65,97%. Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap Ruas Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Riau, sehingga diperoleh panjang jalan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah menurun sebesar 34,03% karena pada tahun sebelumnya realisasi Panjang jalan dalam kondisi baik adalah 1.3843,03 Km. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 65,14 %, mengingat tipe perhitungan indikator Panjang jalan dalam kondisi baik bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 1.635,72 Km.

Grafik 3.1. Data Kondisi Jalan Provinsi (Km) di Provinsi Riau



Dari data diatas menunjukkan kondisi jalan yang baik pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan penanganan ruas jalan hanya difokuskan pada perbaikan ruas jalan dalam kondisi rusak ke sedang, sehingga kondisi ruas jalan yang sedang mengalami kenaikan sebesar 22,80% dari sebelumnya 8,99%. Disamping itu, yang menjadi target Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan difokuskan pada kondisi jalan mantap, yang terdiri dari kondisi jalan baik dan sedang. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan penanganan ruas jalan tidak maksimal dan terdapat mobilisasi angkutan barang yang melebihi kapasitas kekuatan jalan tersebut. Rasio panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan kondisi jalan yang sedang mengalami kenaikan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebesar Rp 891.656.123.826,95,- atau 76,83% dari total pagu anggaran Rp 1.160.568.507.794,87 artinya terdapat efisiensi sebesar 23,17% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja panjang jalan dalam kondisi baik diantaranya :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
7. Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi





Grafik 3.2. Gubri H Wan Thamrin Hasyim Tinjau Progres Pembangunan TOL Pekanbaru Dumai dan Jembatan Siak IV

3. Indikator kinerja Rasio elektrifikasi

Ratio Elektrifikasi (RE) adalah persentase rumah tangga atau Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada dalam suatu wilayah. Perumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) adalah sbb:

$$\frac{\text{Jumlah KK yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah KK se-Provinsi Riau}} \times 100 \%$$

Perhitungan Ratio Elektrifikasi (RE) Provinsi Riau ini berguna untuk mengetahui sejauh mana angka **pemenuhan kebutuhan listrik** bagi masyarakat (rumah tangga) dalam wilayah Provinsi Riau.

Pada akhir Tahun 2018, Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau adalah sebesar 90,63%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 9.37% masyarakat belum menikmati listrik, yang tersebar di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pembangunan sarana kelistrikan. Jika dilihat dari target (sebesar 85,83%), maka realisasinya sudah melampaui target (tingkat capaian kinerja sebesar 105,59 %).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2017, tingkat capaian pada Tahun 2018 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan



pemerintah sudah menargetkan Rasio Elektrifikasi 99,9% pada tahun 2019 melalui APBN yang sebagian besar menjadi kinerja PLN.

Adapun Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Berlistrik			Jumlah Desa Tak Berlistrik (RE Desa < 25 %)	Ratio Desa Berlistrik (pln)	Ratio Desa Berlistrik (Non PLN)	Ratio Desa Berlistrik (pln+ non pln)	Keterangan (Sumber Data)
			PLN	Non-PLN	Total					
1	Siak	131	89	41	130	1	67.98%	31.25%	99.24%	Database RE Prov. Riau
2	Bengkalis	151	144	7	151	0	95.36%	4.64%	100.00%	Database RE Prov. Riau
3	Kep. Meranti	101	87	14	101	0	86.14%	13.86%	100.00%	Database RE Prov. Riau
4	Rokan Hilir	180	151	28	179	1	83.89%	15.56%	99.44%	Database RE Prov. Riau
5	Rokan Hulu	154	133	18	151	3	86.36%	11.69%	98.05%	Database RE Prov. Riau
6	Indragiri Hulu	194	154	40	194	0	79.38%	20.62%	100.00%	Database RE Prov. Riau
7	Indragiri Hilir	237	145	39	184	53	61.18%	16.46%	77.64%	Database RE Prov. Riau
8	Pelalawan	118	95	12	107	11	80.51%	10.17%	90.68%	Database RE Prov. Riau
9	Kampar	250	227	17	244	6	90.80%	6.80%	97.60%	Database RE Prov. Riau
10	Kuantan Singingi	229	228	1	229	0	99.56%	0.44%	100.00%	Database RE Prov. Riau
11	Dumai	33	32	0	32	1	96.97%	0.00%	96.97%	Database RE Prov. Riau
12	Pekanbaru	58	58	0	58	0	100.00%	0.00%	100.00%	Database RE Prov. Riau
	TOTAL	1,836	1,543	217	1,760	76	84.04%	11.82%	95.86%	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Target akhir RPJMD pada Tahun 2019 untuk indikator Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 87,33%. Jika dibandingkan dengan Target akhir RPJMD tahun 2019, capaian s/d Tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 103,78 % (sudah melampaui target akhir RPJMD).



Rasio Elektrifikasi Indonesia per kuartal tiga Tahun 2018 sebesar 98,05 %. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut.

- Memastikan kegiatan fisik seperti pembangunan tiang listrik dan jaringan dan pengadaan genset yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM terlaksana dengan baik
- melakukan koordinasi dengan PLN dan stake holder terkait

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya aksesibilitas energi listrik bagi rumah tangga” di Provinsi Riau adalah adanya upaya untuk menciptakan Sinergitas dan saling mengisi antara PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepri sebagai salah satu BUMN Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Pemerintah Pusat (melalui APBN) serta Pemerintah Provinsi (melalui APBD) sebagai wakil negara dalam penguasaan penyediaan tenaga listrik sesuai pasal 3 ayat (1) UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja rasio elektrifikasi adalah Rp 16.139.749.620,- atau 17,27% dari total pagu anggaran Rp 93.428.559.709,- artinya terdapat efisiensi sebesar 82,73% guna mencapai kinerja tersebut. Jika dilihat dari realisasi anggaran pada indikator hanya sebesar 17,27% akan tetapi capaian kinerja mencapai 105,59%. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar kinerja dan efisiensi anggaran maka kinerja Pemerintah semakin baik. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja rasio elektrifikasi diantaranya :

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas

5. Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi



Gambar 3.3. Kegiatan Pemasangan Tiang Listrik di Desa Sungai Mintan, Kabupaten Indragiri Hilir

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2018			% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8.76	8,67	8.76*	101,04%	100,46%
	Angka harapan lama sekolah	13.03	13,43	13.03*	97,02%	95,39%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Ket : *Data Tahun 2017



1. Indikator Angka rata-rata lama sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Bersumber dari Neraca Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pusat Statistik Riau, rata-rata lama sekolah Provinsi Riau Tahun 2017 baru mencapai 8,76 tahun, naik 0,17 dari tahun sebelumnya (8,59 tahun).

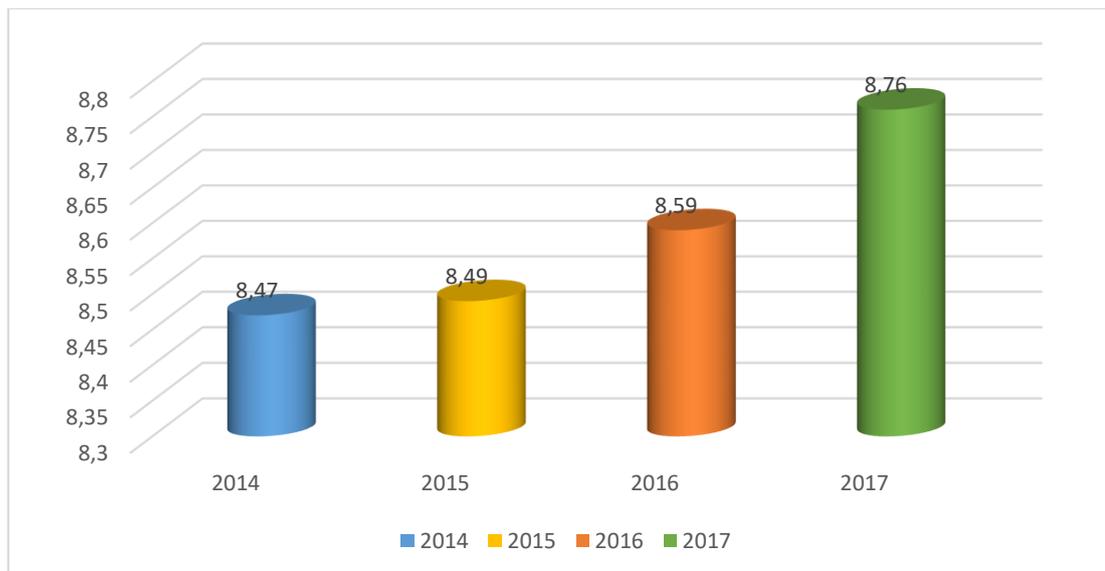
Tabel 3.6. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 - 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kampar	8,62	8,84	8,85	9,09
2.	Bengkalis	8,80	8,82	8,83	8,89
3.	Indragiri Hulu	7,55	7,82	7,83	7,89
4.	Indragiri Hilir	6,81	6,82	6,94	7,18
5.	Pelalawan	7,82	8,17	8,18	8,19
6.	Rokan Hulu	7,83	7,84	7,97	8,18
7.	Rokan Hilir	7,62	7,62	6,94	7,89
8.	Siak	9,05	9,20	8,71	9,40
9.	Kuantan Singingi	8,17	8,18	8,19	8,20
10.	Kep. Meranti	7,44	7,45	7,46	7,47
11.	Pekanbaru	10,95	10,97	11,20	11,21
12.	Dumai	9,56	9,57	9,58	9,67
Provinsi Riau		8,25	8,47	8,59	8,76

Sumber Data : BPS Provinsi Riau (riau.bps.go.id)



Grafik 3.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2014-2017



Sumber Data : BPS Provinsi Riau (riau.bps.go.id)

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, menunjukkan peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dari tahun 2014-2017 sebesar 0,29 persen. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi tahun 2017 terdapat pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

Angka harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren, dengan Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Jika dilihat dari indikator angka HLS Provinsi Riau sebesar 13,03 Tahun 2017. HLS terendah berada di Kabupaten Rokan Hilir (11,25 Tahun) dan tertinggi di Kota Pekanbaru (14,93 Tahun).

Tabel berikut menggambarkan perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) kabupaten/kota se Provinsi Riau Tahun 2010 – 2017.

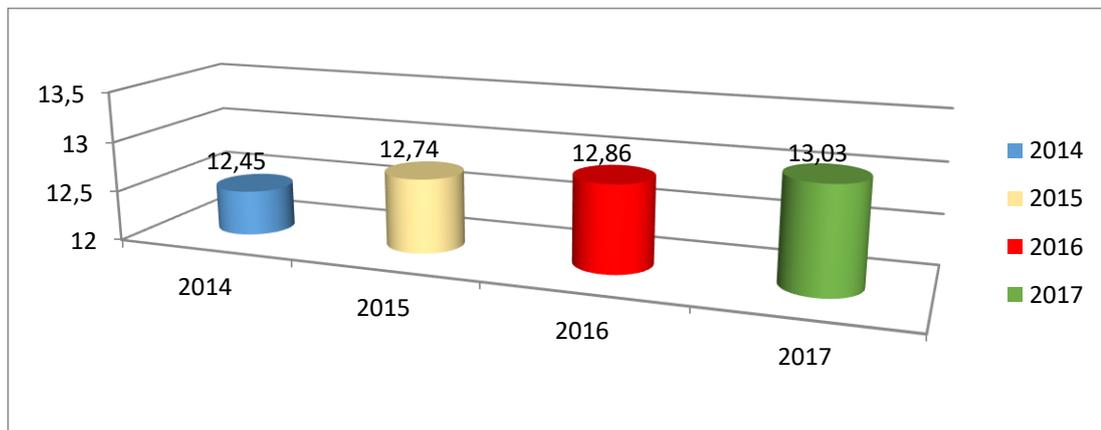


Tabel 3.7. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 - 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Kampar	12,72	12,86	12,87	13,20
2.	Bengkalis	12,35	12,39	12,72	12,73
3.	Indragiri Hulu	11,51	11,92	12,24	12,29
4.	Indragiri Hilir	10,67	11,38	11,58	11,88
5.	Pelalawan	11,02	11,56	11,68	11,89
6.	Rokan Hulu	12,36	12,39	12,59	12,81
7.	Rokan Hilir	11,42	11,75	12,06	12,25
8.	Siak	11,81	11,26	12,56	12,72
9.	Kuantan Singingi	11,96	12,64	12,81	13,26
10.	Kep. Meranti	12,34	12,41	12,74	12,77
11.	Pekanbaru	14,07	14,86	12,75	14,93
12.	Dumai	12,40	12,46	12,86	12,97
Provinsi Riau		12,45	12,74	12,86	13,03

Sumber Data : BPS Provinsi Riau (riau.bps.go.id)

Grafik 3.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau Tahun 2014-2017



Sumber Data : BPS Provinsi Riau (riau.bps.go.id)

Dari Tabel sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan HLS di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dari Tahun 2014 s.d 2017 mengalami kenaikan yang signifikan. HLS Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar dari 0,17 di dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah adalah



pemenuhan sarana dan prasarana seperti : Pembangunan Ruang Kelas Baru Sedang dan Berat , Pembangunan Ruang Labor, Pembangunan Alat Produktif, mengaktifkan Sekolah Marjinal dan Pembangunan Sekolah Jarak Jauh. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembiayaani dana APBD maupun dana APBN.

Hambatan yang ditemui di Dinas Pendidikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya guru atau tenaga pendidikan yang belum bersertifikasi.
2. Penyebaran guru yang tidak merata mengakibatkan masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
3. Masih sulitnya akses jalan menuju sekolah-sekolah didaerah terpencil.
4. Kurangnya pemahaman arti pendidikan bagi masyarakat terpencil.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru.
2. Pemerintah memberikan tunjangan khusus bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah -daerah terpencil sebagai motivasi agar guru-guru bersedia ditempatkan didaerah terpencil tersebut.
3. Berkordinasi dengan OPD terkait mengenai pembangunan akses jalan menuju sekolah-sekolah yang terpencil.
4. Memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang penting arti pendidikan bagi generasi muda.

Program untuk menunjang Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah melalui Program Pendidikan Menengah, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 765.683.904.904,-



Gambar 3.4. Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman meresmikan gedung baru SMA Negeri 4 Pekanbaru

SASARAN 3 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui Angka harapan hidup. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2017	Ralisasi Kinerja 2018			% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,99 tahun	71,33 Tahun	70,99 Tahun*	99,52%	99,33%

Ket : *Data Tahun 2017

Secara umum Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat telah mencapai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 dilihat dari 1 indikator kinerja. Terkait Angka harapan hidup Tahun 2018 masih belum dilakukan rilis oleh BPS Provinsi Riau sehingga realisasi sampai dengan 2017 masih sebesar 70,99 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,52%.

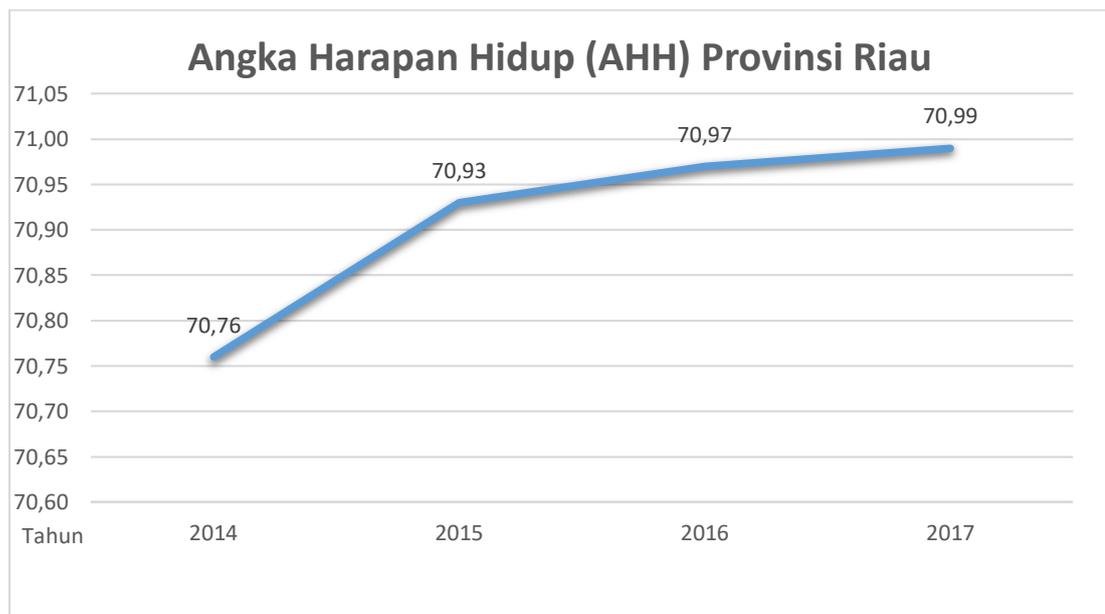
Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 meningkat sebesar 0,02%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila



dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 99,33% mengingat tipe perhitungan indikator Rasio Angka harapan hidup bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 71,74.

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui Angka harapan hidup. Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah Usia Harapan Hidup. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Misal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Umur itu diukur dari tarikh seseorang lahir hingga tarikh masa (sekarang). Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Maka dari itu pembangunan terhadap manusia harus lebih mengarahkan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang.

Grafik 3.4. Angka Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2014-2017



Sumber: BPS Prov Riau

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2017, angka harapan hidup Provinsi Riau terus mengalami peningkatan sebesar 0,24 tahun.



Peningkatan usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau merupakan efek keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Keberhasilan peningkatan usia harapan hidup penduduk di Provinsi Riau salah satunya didukung oleh keberhasilan pemerintah daerah di bidang kesehatan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yakni:

1. Mortalitas
2. Morbiditas
3. Status Gizi
4. Perilaku Masyarakat
5. Kesehatan Lingkungan

Angka kematian (morbiditas) dipengaruhi oleh angka kematian bayi, balita dan Ibu. Dalam rangka mengurangi angka kematian Ibu, bayi dan Balita, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Meningkatkan program berbasis masyarakat dengan kunjungan rumah (membentuk Tim pembina keluarga),
2. Peningkatan Kapasitas Petugas (bidan) di puskesmas
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung (Deteksi resti kit dan penerapan buku KIA).

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka mengurangi tingkat kematian Bayi, Ibu dan Balita adalah sebagai berikut.

1. Jumlah distribusi dan kualitas SDM kesehatan yang masih belum merata, sehingga belum semua nakes dapat memberikan pelayanan Kunjungan Neonatal, bayi sesuai standar
2. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai
3. Dalam Penurunan jumlah Kematian Anak belum adanya dukungan dari lintas sector/lintas program terkait secara optimal
4. Masih banyaknya persalinan walaupun ditolong oleh nakes tetapi tetap dilakukan di rumah [bukan fasyankes]
5. Kurangnya kepatuhan petugas dalam menjalankan pelayanan sesuai pedoman



Sementara solusi yang akan dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kematian Bayi, Ibu dan Balita adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan dan memberikan peran serta tenaga kesehatan untuk mengaktifkan pelatihan pada tingkat puskesmas melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang tersedia di Puskesmas
2. Menyediakan Saran dan Prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka Penurunan Kematian Neonatal dan Bayi
4. Persalinan harus dilakukan di fasyankes sesuai dengan Permenkes No.97 Tahun 2014 yang menyatakan Persalinan harus dilakukan di Fasyankes
5. Meningkatkan SDM dalam pengelolaan Program Kesehatan Anak

Meningkatnya angka harapan hidup juga dipengaruhi oleh layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Layanan Kesehatan, baik di tingkat Faskes Pertama, Puskesmas hingga Rumah Sakit. Adapun upaya yang dilakukan fasilitas kesehatan dalam hal ini Rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi fungsi rumah sakit Kelas B Pendidikan sebagai rujukan bagi rumah sakit lainnya di Wilayah Provinsi Riau.
2. Optimalisasi Pelayanan Unggulan (Pelayanan jantung terpadu, pelayanan kanker terpadu dan trauma center)
3. Penataan sistem pelayanan sesuai dengan perkembangan pelayanan dan teknologi
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan standar ketenagaan dan kompetensi profesi
5. Membangun kerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan lainnya
6. Perubahan budaya kerja pelayanan yang berfokus pada penyakit (*disease centre*) menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient safety*)

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Rp 489.611.847.014 ,- atau 60,14% dari total pagu anggaran Rp814.148.052.245 ,- terdapat efisiensi sebesar 39,86% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya

keuangan tersebut direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya :

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anakProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4. Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan
5. Program Penanggulangan Krisis Kesehatan
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
9. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata



Gambar 3.5. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman beserta Istri meninjau pelaksanaan Imunisasi saat hadiri Penganjangan Kampanye Measles Rubella (MR), di SD 002 Senapelan Pekanbaru

SASARAN 4 : MENURUNNYA TINGKAT KEMISKINAN

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2017	Realisasi Kinerja 2018			% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	7,41	6,86	7,21	86,46%	83,71%
	Gini Rasio	0,325	0,35	0,347	100,86%	100,86%

Sumber : BPS Riau, 2019

Secara umum Sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan telah mencapai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 dilihat dari 2 indikator kinerja.

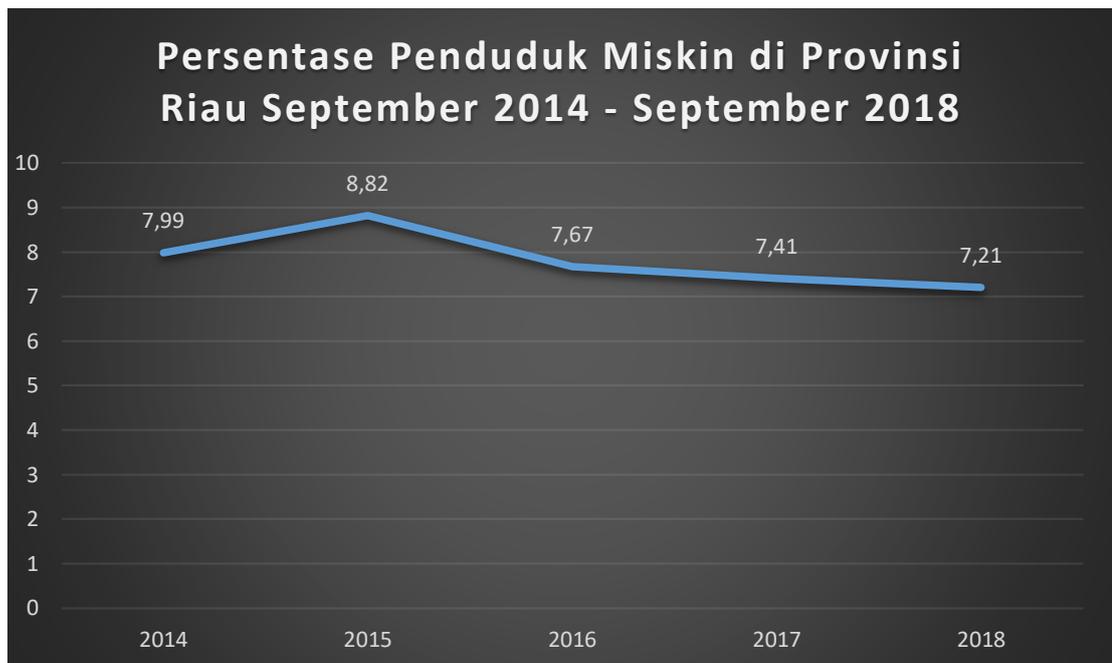
1. Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

Indikator kinerja tingkat kemiskinan Tahun 2018 adalah sebesar 7,21% dengan capaian kinerja 86,46% dari target 6,86%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tahun 2018 memiliki 494,26 (ribu) penduduk miskin atau 7,21% dari seluruh populasi Riau. Sehingga penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,20% dari tahun 2017. Penduduk miskin mayoritas berlokasi di daerah pedesaan sebanyak 322,05 (ribu) jiwa, jauh melebihi jumlah penduduk miskin di perkotaan yang tercatat hanya 172,21 (ribu) jiwa.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau mencapai 83,71%, mengingat tipe perhitungan indikator jumlah penduduk miskin bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 6,2%. Dengan demikian, untuk mencapai kinerja 100% perlu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,01%.



Grafik 3.5. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau, September 2014-September 2018



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019

Bila dilihat dari Tahun 2015 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 1,61% sampai dengan tahun 2018.

Hambatan pelaksanaan upaya menurunkan angka tingkat kemiskinan di Provinsi Riau sebagai berikut:

- Lambatnya pertumbuhan ekonomi
- Daya beli masyarakat menurun berakibat terhadap turunnya proses jual beli perdagangan
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.



Tabel 3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi se-Sumatera dan Nasional September-2018

No	Provinsi/ Indonesia	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
		Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
1	Aceh	163,36	668,14	831,50	9,63	18,52	15,68
2	Sumut	686,97	605,02	1291,99	8,84	9,05	8,94
3	Sumbar	125,58	227,66	353,24	4,99	7,90	6,55
4	Riau	172,21	322,05	494,26	6,25	7,86	7,21
5	Jambi	116,50	146,97	281,47	10,08	6,80	7,85
6	Sumsel	385,56	689,71	1076,40	12,43	13,05	12,82
7	Bengkulu	96,74	206,80	303,55	14,94	15,64	15,41
8	Lampung	230,20	861,40	1091,60	9,06	14,73	13,01
9	Babel	22,22	47,71	69,93	2,78	7,16	4,77
10	Kep. Riau	98,46	26,90	125,36	5,15	11,26	5,83
	Indonesia	10.131,28	15.543,31	25.674,58	6,89	13,10	9,66

Apabila dibandingkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Sumatera, Provinsi Riau menempati posisi 4 (empat) dengan persentase kemiskinan sebesar 7,21%. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau jauh lebih baik dari Persentase penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 9,66%.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK. Semakin tinggi GK, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Tabel 3.11. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase penduduk miskin
(1)	(2)	(5)	(6)
Perkotaan	499 402	172,21	6,25
Perdesaan	478 445	322,05	7,86
Kota + Desa	487 146	494,26	7,21

Sumber : BPS, September 2019



Upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian Sasaran Strategis dilaksanakan melalui Program dan kegiatan seperti :

1. Dinas koperasi melakukan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, program Pengembangan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Dinas Sosial melakukan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan berupa Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna (KT), Pelatihan Dan Fasilitasi Penyuluh Sosial Swadaya, Pemberdayaann Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM), Rapat Kerja Dan Musyawarah Provinsi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

2. Indikator Kinerja Gini Rasio

Secara umum Gini rasio telah mencapai target sesuai yang ditetapkan. Realisasi indikator kinerja Gini Rasio Tahun 2018 adalah 0,347 dari target 0,35 sehingga capaian kinerja sebesar 100,86%. Artinya semakin rendah gini rasio maka semakin rendah angka kesenjangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau.

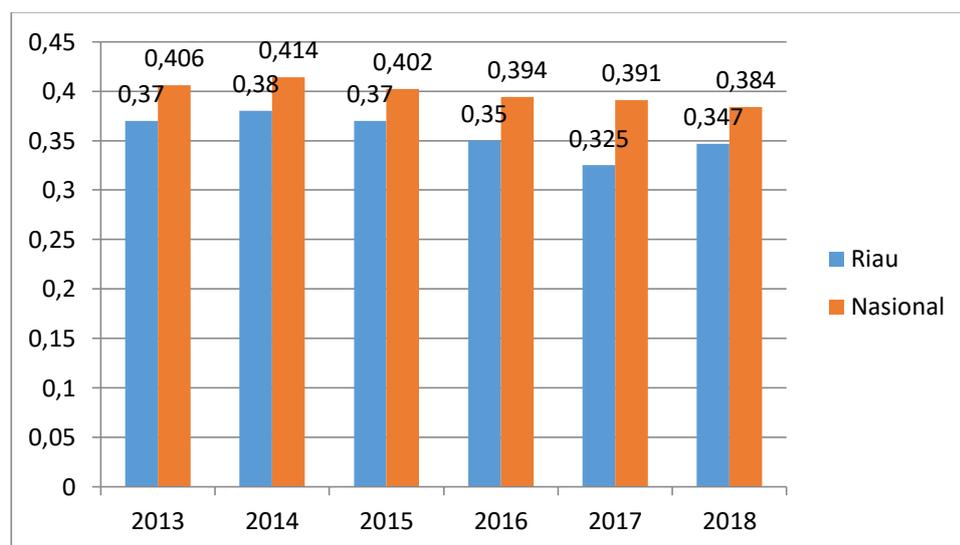
Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017, Angka Gini Rasio Provinsi Riau tahun 2018 lebih tinggi 0,022 dari realisasi tahun 2017 yaitu 0,325. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat Provinsi Riau Tahun 2018 mengalami peningkatan.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100,86%. Mengingat tipe perhitungan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 0.35



Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang sangat sejahtera sementara yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 3.6. Rasio Gini Provinsi Riau Dari Tahun 2013 – 2018



Sumber : BPS Pusat, 2019

Dilihat dari rasio Gini 2015 hingga 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2018 indeks gini rasio Provinsi Riau adalah 0,347, hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan pendapatan yang cukup besar di Provinsi Riau. Dilihat dari sumbernya ketimpangan pendapatan berasal dari kesenjangan antar individu, antar sektor dan kesenjangan antar daerah. Kesenjangan ini terutama terjadi di wilayah perkotaan dengan angka gini rasio mencapai 0,379 dibandingkan dengan angka gini rasio di pedesaan yang hanya sebesar 0,292.



Tabel 3.12. Gini Ratio Menurut Provinsi Se-Sumatera Tahun 2017-2018

No	Provinsi	September 2017			Maret 2018			September 2018		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	0,334	0,299	0,329	0,344	0,285	0,325	0,338	0,273	0,318
2	Sumatera Utara	0,365	0,264	0,335	0,335	0,272	0,318	0,330	0,257	0,311
3	Sumatera Barat	0,309	0,288	0,312	0,338	0,280	0,321	0,308	0,262	0,305
4	Riau	0,343	0,299	0,325	0,356	0,288	0,327	0,379	0,292	0,347
5	Jambi	0,379	0,295	0,334	0,354	0,308	0,334	0,351	0,295	0,335
6	Sumatera Selatan	0,387	0,328	0,365	0,381	0,316	0,358	0,354	0,296	0,341
7	Bengkulu	0,379	0,317	0,349	0,394	0,318	0,362	0,388	0,316	0,355
8	Lampung	0,360	0,301	0,333	0,367	0,317	0,346	0,338	0,294	0,326
9	Bangka Belitung	0,288	0,236	0,276	0,296	0,238	0,281	0,289	0,222	0,272
10	Kepulauan Riau	0,355	0,286	0,359	0,325	0,289	0,330	0,333	0,262	0,339
	INDONESIA	0,404	0,320	0,391	0,401	0,324	0,389	0,391	0,319	0,384

Sumber : BPS Pusat, 2019

Jika dibandingkan dengan angka Gini rasio wilayah Sumatera Provinsi Riau Provinsi Riau termasuk angka gini rasio kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Bengkulu, artinya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau masih tinggi, namun sudah lebih rendah dari angka gini rasio Nasional yaitu 0,384.

Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Memperbesar alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, melalui jaminan dasar pendidikan, kesehatan dan pangan
- Penyaluran Dana Desa yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas dasar di desa baik pembangunan pendidikan, pangan, kesehatan dan infrastruktur.

- Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil.

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan masyarakat adalah Rp 174.797.875.706,- atau 91,85% dari total pagu anggaran 190.301.936.941,- artinya terdapat efisiensi sebesar 8,15% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan masyarakat diantaranya :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4. Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Pelayanan Sosial Melalui Panti



Gambar 3.6. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman menyerahkan Rumah Layak Huni kepada Masyarakat saat Peresmian 4 Jembatan di Kec Rokan IV Koto kab Rohul



SASARAN 5 : MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN

Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran diukur dari Tingkat Pengangguran. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,68%	6,20%	107,19%	107,19%

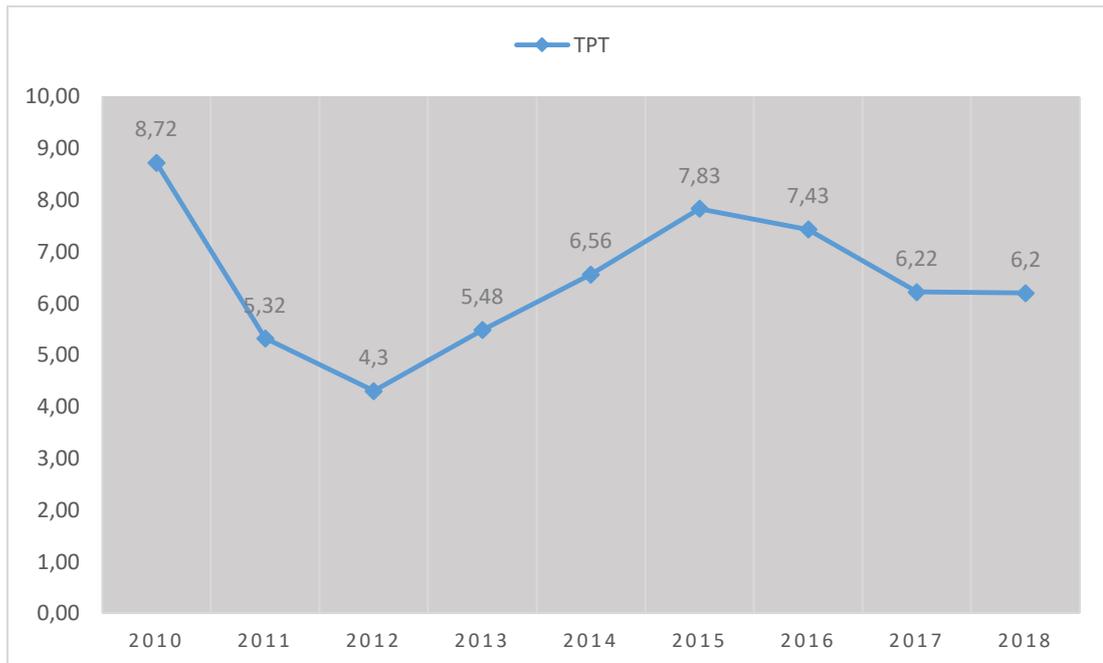
Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019

Pengangguran dapat diartikan orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 sampai 64 Tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan, dengan demikian indikator ini bertujuan untuk mengetahui angka pengangguran yang ada di Provinsi Riau.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan pekerjaan tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 6,22% pada tahun 2017 menjadi 6,20% pada tahun 2018. Realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Tahun 2018 adalah 6,20% dengan capaian kinerja sebesar 107,19%.



Grafik 3.7. Persentase Pengangguran Terbuka Provinsi Riau 2005-2018



Sumber Data : BPS Provinsi Riau, 2019

Tingkat Pengangguran Tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi Tingkat Pengangguran Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0.02%. Artinya jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2018.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah mencapai target dengan capaian 107,19% dengan target akhir RPJMD 6,20.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran tersebut ditempuh melalui pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat bagi pencari kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja, memfasilitasi angkatan kerja agar menjadi wirausahawan tangguh, serta memfasilitasi penempatan tenaga kerja lokal ke perusahaan-perusahaan.

Selain itu usaha lain yang telah dilakukan adalah melalui Kegiatan Padat Karya yang merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan dapat mengurangi pengangguran melalui pembangunan sarana maupun prasarana pendukung untuk memperlancar roda perekonomian, khususnya di daerah pedesaan yang masih tertinggal.



Secara umum, program padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Program padat karya bertujuan agar tersedianya kesempatan kerja atau usaha dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi produktif pedesaan yang berkesinambungan. Juga terbangunnya fasilitas infrastruktur ekonomi pedesaan dengan jangka waktu tertentu dan berkesinambungan bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan upaya penurunan angka pengangguran di Provinsi Riau dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 174.797.875.706,- atau 91,85% dari total pagu anggaran Rp 190.301.936.941,- artinya terdapat efisiensi sebesar 8,15% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja penurunan angka pengangguran diantaranya :

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
4. Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. jumlah angkatan kerja yang tidak terampil/kompeten masih tinggi
2. pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengkoordinir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten
3. lapangan kerja di sektor format relative terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja
4. penyerapan tenaga kerja ke sektor formal maupun informal masih relative



terbatas

5. kualitas SDM angkatan kerja relative rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat kerjaan (tingkat pendidikan didominasi SD ke bawah)

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepannya dalam rangka mengatasi kendala/permasalahan yang muncul dalam mencapai target tersebut adalah.

1. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui Program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
2. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja
3. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal
4. Melalui penguatan UPT pelatihan kerja sebagai lembaga strategis untuk membekali kompetensi dan membangun keunggulan kompetisi
5. membangun jarring pngaman tingkat pengangguran terbuka melauai Program Pelatihan Alih Kerja atau Alih Profesi bagi pekerja ter-PHK agar tidak menambah angka pengangguran

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT*

Sasaran Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* diukur dari Opini BPK, Skor LPPD, Nilai Akuntabilitas, Nilai Keterbukaan Informasi, dan Nilai Reformasi Birokrasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya <i>Good Governance and Clean Government</i>	Opini BPK	WTP	WTP*	100%*	100%*
	Skor LPPD	2,6	2,5093*	96,51%*	96,51%*
	Nilai Akuntabilitas	BB	B	95,73%	83,67%
	Nilai Keterbukaan Informasi	46,49	45,43	97,72%	84,96%
	Nilai Reformasi Birokrasi	39,60	52,88*	133,54%*	130,28%

Ket : *) data sementara

Secara umum Sasaran Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* telah mencapai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 6 dilihat dari 5 indikator kinerja.

1. Indikator Opini BPK

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 6 pada Indikator kinerja Opini BPK Tahun 2017 adalah WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dalam hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Riau Tahun 2017. Opini ini adalah sama dengan perolehan Pemprov Riau tiga tahun sebelumnya dan diharapkan pada tahun 2018 Opini BPK pada LHP dan LKPj Provinsi Riau adalah WTP. Penyerahan LHP dan LKPj oleh BPK akan dilaksanakan pada Juni 2019.

Capaian indikator kinerja ini disebabkan beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD
2. Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
3. Persentase kesesuaian Renja OPD terhadap Renstra OPD



4. Jumlah kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan
5. Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi
6. Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah

Beberapa upaya pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan untuk mempertahankan WTP diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan merubah pola pendekatan *money follow function* menjadi *money follow programme priority*.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang mengutamakan nilai akuntabel dan transparansi.
3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebelum dilakukan evaluasi oleh BPK.
4. Pelaksanaan program pemerintah yang memprioritaskan pada program yang mendukung kepentingan masyarakat Provinsi Riau.

Adapun Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan asset dari Perangkat Daerah ke BPKAD
2. Adanya beberapa belanja modal yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak terdapat di dalam RKBMD
3. keterlambatan pencairan hibah dikarenakan kurangnya pemahaman penerima hibah terkait dengan regulasi tentang pembayaran hibah dari tunai menjadi non tunai sesuai dengan instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi

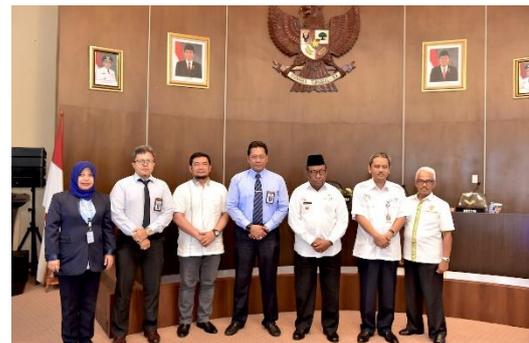
Solusi yang akan dilakukan kedepannya dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset pada OPD

2. Memberikan informasi kepada seluruh OPD untuk melakukan penyusunan RKBMD sebelum penyusunan RKPD/Renja
3. Melaksanakan Sosialisasi tentang Regulasi terkait Pencairan Hibah kepada seluruh penerima hibah oleh OPD

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja opini BPK adalah Rp 20.376.455.899,- atau 72,74% dari total pagu anggaran Rp 28.011.829.328 ,- artinya terdapat efisiensi sebesar 27,26% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja rasio elektrifikasi diantaranya :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota



Gambar 3.7. Plt Gubri H Wan Thamrin Hasyim Menerima Piagam WTP Tahun 2017 dan FGD Pelaksanaan DAK Tahun 2018, di Ruang Rapat Auditorium Lt. 8 Gedung Menara Lancang Kuning.



2. Indikator Skor LPPD

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya.

Penyusunan LPPD Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh OPD dan penilaian LPPD Provinsi Riau Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara terukur, dan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen PAN-RB, BPS, dan LAN) terhadap Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dari aspek Manajemen Pemerintahan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target :

1. Melakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu sebelum dilakukan oleh Tim Nasional (Kemendagri)
2. Melakukan sosialisasi mengenai LPPD Provinsi Riau kepada OPD di lingkungan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

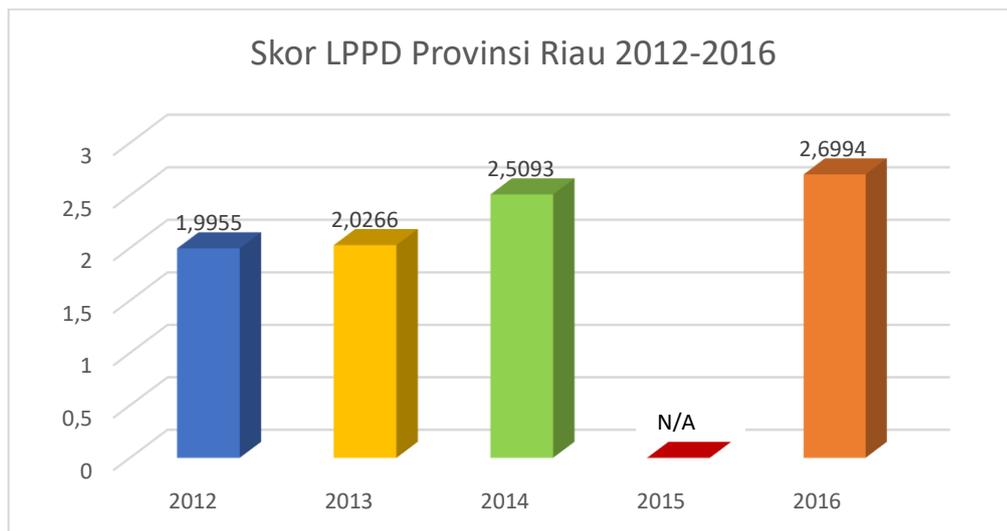


3. Membuat sistem e-LPPD guna mempercepat pengumpulan data

Hambatan/kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sulitnya pengumpulan data LPPD dari OPD Provinsi Riau maupun Kabupaten/Kota
2. Masih terbatasnya penambahan dana untuk penyusunan LPPD Provinsi Riau.

Grafik 3.8 Skor LPPD Pemerintah Provinsi Riau



Skor LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau 2012-2016 disajikan pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15. Skor LPPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau 2012-2016

No	Provinsi/ Kab.Kota	LPPD tahun 2016			LPPD tahun 2015			LPPD tahun 2014			LPPD tahun 2013			LPPD tahun 2012		
		Rang king	Skor	Status												
1	Provinsi Riau	24	2,6994	T	(N/A)	(N/A)	(N/A)	15	2.5093	T	29	2.0266	T	25	1.9955	S
2	Siak	74	3,2401	ST	43	3.2582	ST	25	3.2381	ST	19	3.1334	ST	117	2.6652	T
3	Kampar	214	2,9642	T	134	3.0175	ST	158	2.8311	T	357	1.0977	S	316	1.3941	S
4	Pelalawan	249	2,8746	T	140	3.0084	ST	142	2.8924	T	306	1.6792	S	269	1.7999	S
5	Indragiri Hilir	289	2,7722	T	165	2.9497	T	218	2.6453	T	288	1.8035	S	179	2.2618	T
6	Kuantan Singingi	310	2,7084	T	233	2.8107	T	178	2.7742	T	219	2.3058	T	145	2.4694	T
7	Bengkalis	187	3,0093	ST	234	2.8096	T	107	3.0027	ST	128	2.7181	T	87	2.8139	T
8	Indragiri Hulu	198	2,9958	T	241	2.7924	T	204	2.6998	T	246	2.1818	T	115	2.6676	T
9	Rokan Hilir	274	2,8142	T	248	2.7608	T	193	2.7287	T	262	2.0663	T	294	1.5917	S



No	Provinsi/ Kab.Kota	LPPD tahun 2016			LPPD tahun 2015			LPPD tahun 2014			LPPD tahun 2013			LPPD tahun 2012		
		Rang king	Skor	Status												
10	Kep. Meranti	294	2,7631	T	282	2.6716	T	186	2.7526	T	344	1.3241	S	299	1.5354	S
11	Rokan Hulu	233	2,9097	T	(N/A)	(N/A)	(N/A)	147	2.8805	T	348	1.2454	S	311	1.4250	S
12	Pekanbaru	51	3,0481	ST	58	2.8970	T	43	2.8434	T	84	1.5312	S	83	1.6580	S
13	Dumai	80	2,8230	T	73	2.7275	T	64	2.5524	T	71	2.1579	T	66	2.0986	T

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Keterangan : ST = Sangat Tinggi

T = Tinggi

S = Sedang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Skor LPPD Provinsi Riau tahun 2015 tidak dilakukan penilaian dikarenakan terdapat pergantian Kepala Daerah. Namun, secara umum skor LPPD Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan.

Program untuk meningkatkan Skor LPPD adalah dengan peningkatan kinerja pemerintahan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan menggunakan alokasi belanja langsung APBD Provinsi Riau TA 2018 sebesar Rp 267.683.904.827 atau 95,45% dari total pagu anggaran Rp 280.440.914.878,- artinya terdapat efisiensi sebesar 4,55% guna mencapai kinerja tersebut.

3. Indikator Nilai Akuntabilitas

Penilaian terhadap akuntabilitas Pemerintah Provinsi Riau terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Riau sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai namun masih memerlukan banyak perbaikan.



Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Provinsi Riau Tahun 2018 menunjukkan nilai 67,02 dengan predikat B. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Provinsi Riau 2018

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,32	22,47
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,15	14,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,96
d.	Evaluasi Internal	10	6,94	6,82
e.	Capaian Kinerja	20	12,71	12,71
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,50	67,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya yaitu 65,60 dengan predikat yang sama. Akan tetapi pencapaian ini masih belum mencapai target yang diharapkan pada RPJMD yaitu BB.

Hasil penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Riau tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perencanaan kinerja yang termuat dalam RPJMD, Renstra, PK, IKU, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dilakukan secara terpadu bersama dengan OPD. Namun demikian masih terdapat beberapa OPD yang tujuan strategisnya belum dilengkapi indikator kinerja, sehingga belum tersedia ukuran maupun kriteria dalam menilai pencapaian tujuan tersebut.
2. Pengukuran Kinerja belum dapat dicapai dengan baik oleh beberapa OPD, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa sasaran dan indikator sasaran yang masih berorientasi pada *output*;
3. Pengelolaan anggaran belum sepenuhnya dikaitkan dengan perencanaan kinerja (anggaran berbasis kinerja);



4. Pemilihan program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang tidak efisien dan efektif sehingga berpotensi untuk menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran;
5. Belum seluruh OPD melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan SAKIP Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Melengkapi indikator kinerja untuk setiap tujuan strategis agar dapat mengetahui kriteria keberhasilan capaian kinerja selama 5 tahun;
2. Kualitas indikator kinerja di level OPD perlu disempurnakan sesuai kriteria “SMART” dan relevan sehingga dapat menjadi alat ukur keberhasilan kinerja;
3. Melakukan penjabaran kinerja oleh seluruh OPD terhadap perjanjian kinerja sampai ke level eselon IV. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kinerja yang selaras dari level teratas sampai ke level terbawah;
4. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan bahwa alokasi anggaran pada setiap satuan kerja tidak hanya didasarkan pada *output*, tetapi juga untuk menghasilkan *outcome* yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala pada setiap OPD yang mangacu pada rencana aksi, untuk mengetahui kemajuan pencapaian target kinerja selama tahun berjalan, sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun pencapaian kinerja di tahun berikutnya;
6. Memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
7. Menerapkan *Reward and Punishment* terhadap OPD dan individu yang didasarkan pada capaian kinerja.



Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau kedepannya dalam rangka peningkatan nilai SAKIP Provinsi Riau, adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Sistem Aplikasi SAKIP yang terintegrasi antara perencanaan, penggaran dan pelaporan kinerja;
2. Meningkatkan kualitas monitoring internal pencapaian kinerja perangkat daerah secara berkala;
3. Meningkatkan kualitas indikator kinerja di level OPD sesuai kriteria "SMART";

Program untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas adalah dengan peningkatan kinerja instansi pemerintahan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan diantaranya :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau
2. Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja Se Provinsi Riau
3. Peningkatan Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Kinerja (*E-Performance*)
4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kab/Kota se Prov. Riau
5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Provinsi Riau
6. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan menggunakan alokasi belanja langsung APBD Provinsi Riau TA 2018 sebesar Rp 20.376.455.899 atau 72,74% dari total pagu anggaran Rp 28.011.829.328 ,- artinya terdapat efisiensi sebesar 27,26% guna mencapai kinerja tersebut.

4. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada tahun 2018, Provinsi Riau memperoleh nilai sebagai berikut.



Tabel 3.17. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Provinsi Riau 2018

Nilai Indikator 1 dan 2 (30%)	Nilai Indikator 3 dan 4 (40%)	Nilai Presen tasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
14,80 1. Pengembangan website : 16,33 2. Pengumuman Informasi : 33,00	8,43 3. Pelayanan Informasi : 2,50 4. Penyediaan Informasi : 18,57	22,20	45.43	Kurang Informatif

Dilihat dari hasil evaluasi penilaian keterbukaan informasi diatas, terlihat bahwa nilai keterbukaan informasi yang diperoleh Provinsi Riau masih tergolong dalam kualifikasi kurang informatif. Artinya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan informasi Provinsi Riau diantaranya :

1. Masih kurangnya informasi tentang tata cara pengaduan permohonan informasi;
2. Belum dikembangkannya Aplikasi Layanan PPID berbasis mobile (*androind, linux, apple*);
3. Belum diumumkannya profil PPID terkait Visi Misi PPID
4. Masih kurangnya informasi terkait tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi;
5. Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan terkait dengan keterbukaan informasi publik;
6. Masih terbatasnya aplikasi/*tool* yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online.

Solusi yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menyebarkan informasi tentang tata cara permohonan pengaduan informasi;
2. Mengembangkan aplikasi layanan PPID berbasis online;
3. Mengumumkan profil PPID terkait visi misi PPID;
4. Menyebarkan informasi tentang tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
5. Melaksanakan sosialisasi peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik;



6. Mengembangkan aplikasi/*tool* yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online.

Program yang mendukung ketercapaian nilai keterbukaan informasi adalah sebagai berikut.

1. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
2. Program Kerjasama informasi dan media massa;
3. Program pengembangan informasi dan komunikasi publik.
4. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan menggunakan alokasi belanja langsung APBD Provinsi Riau TA 2018 sebesar Rp 22.578.975.825 atau 73,31% dari total pagu anggaran Rp 30.797.349.575 ,- artinya terdapat efisiensi sebesar 26,69% guna mencapai kinerja tersebut.

5. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan bentuk perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia membutuhkan penyamaan persepsi dan indikasi awal permasalahan reformasi birokrasi di setiap jenjang aktor pelayanan publik. Reformasi Birokrasi juga dinilai sebagai pendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Good Local Governance*.

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 dengan Indeks RB sebesar 52,87 meningkat menjadi 59,73 atau kategori CC pada tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.18. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Riau tahun 2017

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen perubahan	5,00	2,28
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,32
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,34
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,45
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,59
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,76
II	Komponen Hasil		
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,86
2	Pemerintah yang bebas KKN	10,00	8,71
3	Kualitas Pelayanan Publik	1,00	8,18
	Indeks RB	100,00	59,73

Untuk mengetahui hasil (dampak) pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan terhadap kualitas pelayanan publik, dan integritas birokrasi terhadap anti korupsi di Pemerintah Provinsi Riau kami telah melakukan survey terhadap masyarakat pengguna layanan publik dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hasil survey adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19. Hasil Survey Pelaksanaan RB Provinsi Riau tahun 2017

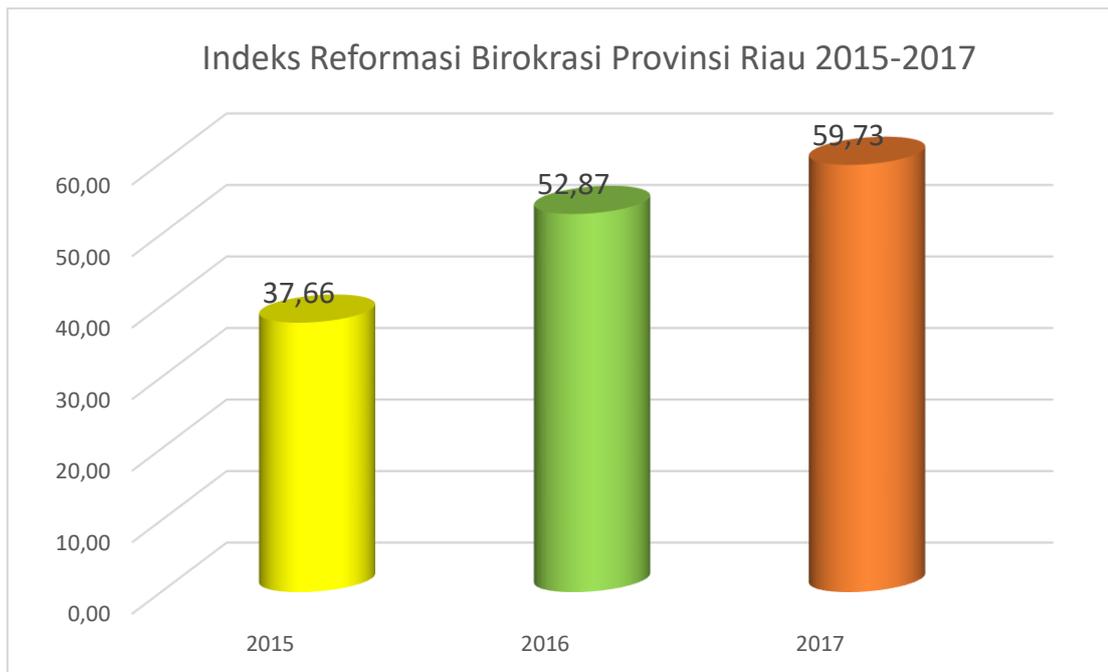
NO	Survey	Nilai Survey	
		2016	2017
I	Survey Internal		
1	Survey Integritas Organisasi	2,65	3,58
II	Survey Eksternal		
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	2,76	3,26
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,85	3,27

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu sebagai berikut.



1. Mengintensifkan peran Tim RB Pemerintah Provinsi Riau dalam meninternalisasikan pelaksanaan RB kepada seluruh pegawai, dari jajaran pimpinan, hingga pegawai level terendah;
2. Menetapkan agen perubahan;
3. Melakukan reviu/evaluasi terhadap OPD guna memastikan apakah OPD sudah memenuhi kriteria tepat fungsi dan tepat ukuran;
4. Memastikan bahwa seluruh pegawai yang bertugas dalam pemberian layanan kepada masyarakat, dan pejabat terkait, memahami SOP yang telah ditetapkan dalam pemberian layanan, sehingga risiko terjadinya maladministrasi dapat dihindari;
5. Melakukan reviu SOP untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara efisien dan terbebas dari penyimpangan serta mengarah pada pencapaian sasaran organisasi;
6. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan SAKIP;
7. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pada Pemerintah Provinsi Riau, dengan menerapkan pola pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kepada kompetensi;
8. Memperkuat penerapan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko penyimpangan dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
9. Meningkatkan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APiP;
10. Membangun Unit Kerja Pelayanan sebagai percontohan menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) sebagai miniature Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Secara berkala melakukan Survei integritas organisasi, Survey Persepsi Pelayanan Publik dan Survey Persepsi Anti Korupsi;

Grafik 3.9. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2015-2017



Hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diantaranya :

1. Melakukan pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membentuk dan menetapkan tim reformasi birokrasi;
2. Penataan manajemen SDM, antara lain dengan menerapkan proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, dan akuntabel, menetapkan standar kompetensi jabatan dan promosi jabatan secara terbuka untuk Pejabat Tinggi Pratama;
3. Dalam hal peningkatan akuntabilitas kinerja sebagian pimpinan telah terlibat dalam penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja;
4. Dalam rangka penguatan pengawasan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan aturan terkait penanganan gratifikasi, SPIP dan pengaduan masyarakat.
5. Provinsi Riau telah menetapkan Slogan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu : **“TUAH PRIORITAS”** yaitu **Terdepan, Unggul, Amanah, Harmonis, Profesional, Religius, Integritas.**



Dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi serta menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu :

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membentuk agent of change dan role model dalam pengimplementasian reformasi birokrasi;
3. Setiap organisasi perlu membuat peta bisnis proses yang dijabarkan dalam bentuk SOP.
4. Perlu melakukan asesment kepada seluruh ASN;
5. Menindaklanjuti pencanangan pembangunan zona integritas dengan melakukan pembangunan unit kerja percontohan menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Inspektorat Provinsi Riau melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kegiatan Pengembagian Budaya Kerja dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembinaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau dan Penyusunan Quick Wins Revolusi Mental dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 340.056.307.830,- atau 71,03% dari total pagu anggaran Rp 478.736.610.519, artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,97%.

SASARAN 7 : TERLESTARIKANNYA KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Sasaran Terlestarikannya Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal diukur dari Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni) dan Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah). Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlestarikannya Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni)	60,00	-	0%	0%
	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	150,00	-	0%	0%

Secara umum capaian Terlestarikannya Keanekaragaman Budaya dan Kearifan Lokal belum dapat dicapai sesuai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 7 dilihat dari 2 indikator kinerja.

1. Indikator Jumlah Karya Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni)

Realisasi indikator kinerja Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni) Tahun 2018 adalah 0%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni) Tahun 2017 adalah 0. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka penetapan HAKI adalah sebagai berikut.

- a. masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyampaikan karya/artefak seni budaya melayu kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk didaftarkan dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- b. suatu seni budaya melayu untuk mendapatkan HAKI membutuhkan kajian dan dokumentasi yang memadai dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh HAKI adalah 4-14 bulan.

Dalam urusan HKI, ada sejumlah hak yang dilindungi, seperti hak cipta dan paten dengan peruntukan yang berbeda. Hak cipta adalah perlindungan untuk ciptaan di bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, tari,



batik, dan program komputer. Sementara hak paten adalah perlindungan untuk penemuan (*invention*) di bidang teknologi atau proses teknologi. Ini prinsip hukum di tingkat nasional dan internasional. Paten tidak ada urusannya dengan seni budaya.

Upaya untuk meningkatkan Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang Dihasilkan (HAKI Karya Seni) adalah dengan meng-inventarisir kekayaan budaya melayu Riau yang islamis sebagai identitas daerah ke dalam Perda Pembentukan perda yang memuat tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu sangat urgent demi keberlangsungan tradisi dan menonjolkan integritas serta kekayaan kebudayaan Melayu islamis Riau sebagai kebudayaan asli daerah dan ke-khas-an daerah Riau.

Dengan adanya Perda ini di harapkan sebagai payung hukum, untuk menuju kemajuan adat budaya dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan orang Melayu Riau. Mengacu pada pasal 18B UUD 1945 ayat 2, sudah seharusnya melayu sebagai identitas bangsa indonesia dan warisan nusantara perlu dilestarikan agar tidak tergerus dan punah seiring perkembangan zaman.

Berdasarkan pada Permendagri No.52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya, maka dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai bentuk cara yang dapat di lakukan oleh berbagai pihak. Pertama, *culture socialization*, yakni merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperkenalkan kebudayaan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya memberikan sosialisasi, rapat kecil ataupun seminar-seminar kecil tentang kebudayaan setempat. Kedua, *culture experience*, yakni pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut dan



melakukan regenerasi. Dengan demikian dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian budaya kita ini.

2. Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)

Indikator berikutnya adalah Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah). Penerapan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) bisa dengan menerapkan dalam pelajaran muatan lokal, misalnya arab melayu. Arab melayu yaitu huruf arab namun menggunakan bahasa melayu. Masyarakat di Riau ini tidak lepas dari tulisan arab melayu. Lalu juga siswa dapat mengambil nilai-nilai moral, nilai ketuhanan, serta nilai karakter dalam budaya melayu.

Selain muatan lokal arab melayu, sekolah juga dapat membentuk pendidikan budaya melayu dengan diterapkannya muatan lokal pelajaran seni. Dalam muatan lokal ini, siswa dapat mengetahui dan mempelajari segala macam seni yang ada di Tanah Melayu Riau ini. Siswa dapat mempelajari tarian-tarian dari Riau, atau menggambar ukiran-ukiran khas melayu Riau. Lalu juga siswa dapat menyanyikan atau mengaransemen lagu daerah Riau. Bahkan siswa juga dapat mementaskan pertunjukkan theater yang bertemakan cerita rakyat dari Riau. Hal ini dapat menambah kreativitas dan wawasan para siswa. Selain itu hal ini juga bertujuan agar para siswa dapat mencintai dan memelihara adat dan budaya mereka sendiri.

Untuk peningkatan sasaran ini setiap sekolah-sekolah di Provinsi Riau ini wajib memasukan pendidikan berbudaya melayu dalam kurikulum di sekolah. Hal ini dibuat agar para generasi penerus bangsa dapat lebih mudah dalam mempelajari dan mengkaji nilai-nilai yang ada pada pola adat dan budaya melayu di Riau. Apalagi di era globalisasi ini kebudayaan kita hampir digeser oleh kebudayaan barat. Banyak kebudayaan barat yang negatif masuk kedalam kehidupan kita. Selain itu tidak semua orang bisa pintar-pintar memilih budaya luar yang masuk. Dengan pendidikan berbudaya melayu inilah pergeseran budaya itu dapat dihindari.



Pada 25 Juni 2018 Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman telah mencanangkan penguatan Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu di Provinsi Riau. Pelaksanaan Mulok Budaya Melayu Riau sudah lama dirancang. Hal ini terkait dari sudah dipersiapkannya kurikulum, peraturan daerah, dan Peraturan Gubernur. Akan tetapi belum terdaftar Budaya Melayu Riau sebagai Mulok di Kemendikbud. Selain itu, juga berkaitan dengan bagaimana jam mengajar guru Mulok sehingga menjadi bahan untuk sertifikasi guru.

Penerapan muatan lokal Budaya Melayu Riau untuk lembaga pendidikan formal di daerah ini dapat dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. Sehingga Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) adalah 0 (belum ada).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau adalah 0%, mengingat tipe perhitungan Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah) bersifat non-kumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 300 Sekolah.



Gambar 3.7. Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman mencanangkan penguatan Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu di Provinsi Riau



SASARAN 8 : MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Sasaran Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama diukur melalui Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama. Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat keharmonisan hidup beragama.

Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama bila dihubungkan dalam pandangan fungsional, agama sebagai sarana mempersatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral, memberikan ketenangan individu dan membuat kedamaian masyarakat, menjadi sumber tatanan masyarakat dan membuat manusia menjadi beradab, berarti menggambarkan perwujudan dari kehidupan harmoni antar umat beragama.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama	Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat beragama	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2019

Secara umum Sasaran Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama sudah dicapai sesuai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 8 dilihat dari 1 indikator kinerja. Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama Tahun 2018 adalah 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama yaitu 100 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 100%, mengingat tipe



perhitungan indikator Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 100%.

Adapun data konflik agama yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22. Daftar Konflik Agama di Provinsi Riau Tahun 2018

KOFLIK YANG TERJADI	PENANGANAN KONFLIK
Keberadaan jemaah Ahmadiyah di desa sebarang kec.Mandau Kab. Bengkalis ditolak oleh warga dikarenakan Ajaran ini sesat sehingga warga merusak rumah ibadah mereka dan menganiaya Jemaah tersebut (Kab. Bengkalis)	- Anggota DPRD Bengkalis dapil Kec. Mandau, FKUB dan KUA di Kec.Mandau menghimbau kegiatan Jemaah tersebut untuk dikurangi, Melakukan monitoring, koordinasi dengan pihak Polres,Koramil dan Tokoh agama setempat mengenai kegiatan mereka
Penyalahgunaan tempat usaha sebagai tempat ibadah yang tidak ada izinnya oleh GBI HOS, sehingga mengakibatkan pelarangan dan penyetopan kegiatan tersebut (Kab. Bengkalis)	Camat Mandau melakukan koordinasi dengan Ormas Islam yaitu FOUI & FPI se Kecamatan Mandau dengan Pihak Upika Kec. Mandau yang dihadiri oleh Polsek Mandau, Danramil, Camat Mandau, FKUB dan KUA di Kec.Mandau
Penyalahgunaan tempat usaha (Ruko) yang di gunakan sebagai tempat ibadah Kristen protestan Nias (BNKP) di Pkl.Kuras tanpa izin, yang daerah sekitar dihuni warga muslim (Kab.Pelalawan)	Mengadakan pertemuan dengan intansi diantaranya Lurah sorek satu, anggota DPRD dapil sorek I, Bhabinkamtibmas Perwakilan BNKP, ketua forum RT/RW se kelurahan Pkl.Kuras, mengingatkan tidak adanya kegiatan keagamaan di ruko tersebut,BNKP bisa melaksanakan ibadah di gereja yang akan dibangun di pipa gas Kel.Sorek satu
Keberadaan patung Budha di di Kecamatan Benai, yang tidak sesuai dengan budaya setempat sehingga permintaan agar patung tersebut di pindahkan dari area PT.Duta Palma Nusantara (Kab. Kuantan Sengingi)	Pihak Pemda kab.Kuansing melakukan koordinasi dengan FKUB, Owner PT.Duta Palma Nusantara, dan Polres Kab. Kuantan Sengingi, untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti memindahkan patung Budha yang ada di daerah tsb
Pembangunan rumah ibadah di Kec. Lubuk Dalam yang tidak ada IMB di wilayah mayoritas muslim sehingga terjadi penolakan oleh warga setempat (Kab. Siak)	Pihak kepolisian melakukan monitoring pengamanan disekitar rumah ibadah dengan Koordinasi diantara Pemda Kab.Siak, epolisian, FKUB dan Tokoh Masyarakat setempat



KOFLIK YANG TERJADI	PENANGANAN KONFLIK
Pemberhentian kegiatan ajaran agama JAI yang telah melenceng dari ajaran Islam di Kec.Kunto Darussalam, dan adanya rencana pembangunan rumah ibadah oleh Jemaah Ahmadiyah (Kab. Rokan Hulu)	Pemda Kab.Rohul membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan masyarakat, berkoordinasi dengan Kejari, Lidikpangal serta mengadakan pengamanan tertutup saat pelaksanaan sholat jumat
Pemberhentian pembangunan rumah ibadah / gereja Parokisanto ignatius di Kec. Rembah (Rohul)	Melakukan mediasi dengan perwakilan Gereja Kahtolik Parakisanto, Pemda sKab.Rohul, dan Lidikpangal agar menghentikan pembangunan tersebut
Perselisihan Dualisme kependetaan di gereja HKI, sehingga pembangunan gereja terhenti dan adanya umat yang beribadah digereja tersebut terganggu di Kec.Rumbai (Pekanbaru)	Camat Rumbai melakukan mediasi yang dihadiri oleh Polsek Rumbai dan Danramil dan Pihak HKI , hasil tersebut diserahkan kepada pareres HKI

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Riau, 2019

Beberapa upaya peningkatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama melalui Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi komunikasi, pertemuan dan pembinaan dengan tokoh agama, LSM Kesbangpol se Provinsi Riau isntansi terkait melalui beberapa forum dan rencana aksi
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu (KOMINDA) dan FKDM
3. Memfasilitasi terbentuknya wadah Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau yang bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, dan membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.



Hambatan/kendala dalam mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. dinamika perilaku dari masyarakat yang berubah sangat cepat membuat sulitnya mengantisipasi sumber pemicu terjadinya konflik
2. Dalam hal ini Badan Kesbangpol hanya sebagai fasilitator, sedangkan dalam penyelesaian konflik dilaksanakan oleh instansi vertikal dan aparat terkait.

Sedangkan solusi yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Tim Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012
2. Melakukan rapat koordinasi mengenai potensi konflik di wilayah Provinsi Riau
3. Memberdayakan peran FKUB, MUI, Kanwil Depag dan instansi terkait mengenai konflik yang terjadi
4. Menggandeng tokoh agama dan elemen masyarakat

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama adalah Rp 22.312.326.636,- atau 46,90% dari total pagu anggaran Rp 47.575.305.440,- artinya terdapat efisiensi sebesar 53,10% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja penyelesaian konflik antar umat beragama diantaranya :

1. Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan umat beragama Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
3. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
4. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
6. Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan



SASARAN 9 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN(TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN)

Sasaran Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan) diukur Melalui Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP).

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan)	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	24,88%	22,44%	90,19%	89,33%
	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,55	92,70	87,83%	85,94%

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019

1. Indikator Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB

Realisasi Indikator kinerja Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2018 adalah 22,44% dengan capaian kinerja sebesar 90,19%. Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah terjadi penurunan sebesar 1,52%. Realisasi tahun 2017 adalah 23,96%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 89,33%, mengingat tipe perhitungan indikator Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 25,12%.

Peranan sektor pertanian semakin strategis karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara dan satu-satunya sektor ekonomi yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi, dengan adanya otonomi daerah saat ini daerah harus mandiri dalam memanfaatkan potensi daerah maka sektor pertanian dapat memberikan



kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan daerah dalam memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan cara melihat progres pertumbuhan maupun peningkatan nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku dari tahun ke tahun. Jika nilai PDRB mengalami peningkatan yang signifikan dalam setiap tahunnya, maka dapat dikatakan perekonomian suatu daerah semakin membaik, sebaliknya jika PDRB suatu daerah menunjukkan stagnasi bahkan penurunan dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah mengalami hambatan.

Tabel 3.24. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

	Lapangan Usaha	Triw IV-2017	Triw III-2018	Triw IV-2018	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,71	21,97	21,92	23,54	22,44
B.	Pertambangan dan Penggalian	25,48	28,65	27,36	25,92	27,82
C.	Industri Pengolahan	25,71	24,54	24,91	25,37	24,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	9,02	8,74	9,34	8,75	8,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,53	9,69	9,82	9,79	9,81
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,84	0,83	0,86	0,86	0,85
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,54	0,53	0,55	0,54	0,54
J.	Informasi dan Komunikasi	0,67	0,67	0,70	0,67	0,68
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,90	0,90	0,89	0,90
L.	Real Estat	0,85	0,83	0,87	0,86	0,85
M,N.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,50	1,40	1,46	1,51	1,45
P.	Jasa Pendidikan	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,18	0,20	0,19	0,19
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,51	0,50	0,54	0,49	0,51
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019

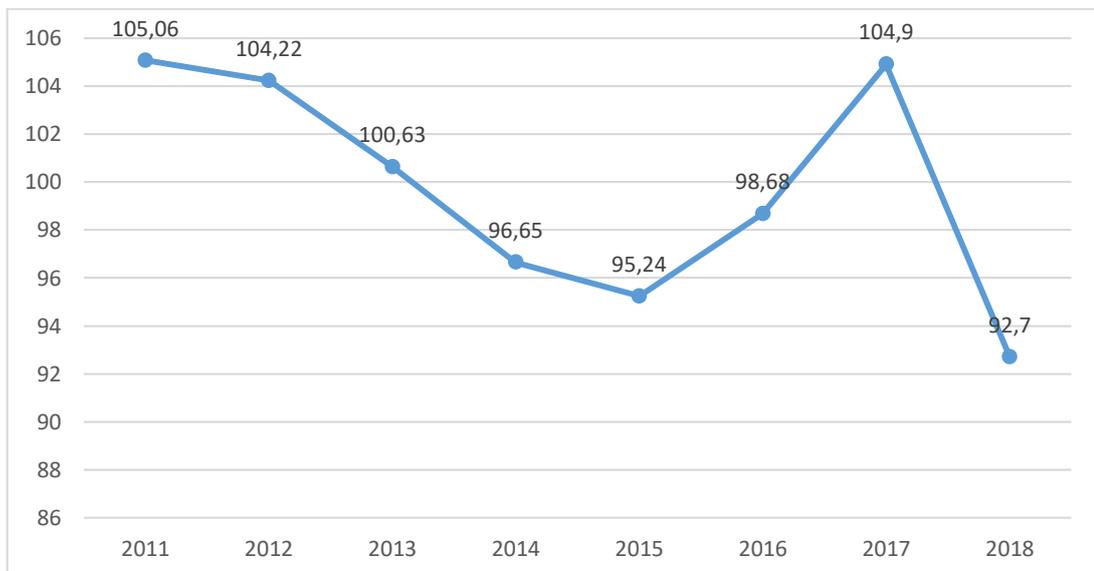


Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Riau Tahun 2018, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 22,44% dan tertinggi ketiga setelah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.

2. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP)

Indikator kinerja selanjutnya adalah Nilai tukar petani (NTP). Capaian indikator kinerja Nilai tukar petani (NTP) Tahun 2018 adalah 92.70, dengan capaian kinerja sebesar 92,52%. Indikator Sasaran ini termasuk dalam kategori Baik karena berada dalam kelompok nilai 75% s/d 100%.

Grafik 3.10. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah menurun sebesar 12,85 % karena pada tahun sebelumnya realisasi NTP adalah 104,9. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 85,94%, mengingat tipe perhitungan indikator NTP bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 107,86.

Konsep NTP dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani, NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani



dalam melaksanakan usaha taninya, Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani,

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani, Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar, Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan untuk mengetahui nilai tukar petani di Provinsi Riau. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan dinyatakan dalam persentase. Tujuan mengetahui indikator NTP untuk melihat tingkat kesejahteraan petani, dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP dapat diartikan kemampuan daya beli atau daya tukar (term of trade) petani relatif lebih baik dan tingkat kehidupan petani juga lebih baik.

Nilai Tukar Petani dilihat dari 5 (Lima) sektor yang terdiri dari Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan.



Tabel 3.25. Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor di Provinsi Riau Tahun 2018

No	Rincian	Rata-rata NTP
1	Tanaman Pangan	
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	139.80
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	134.77
	Nilai Tukar Petani (NTPP)	102.64
2	Tanaman Hortikultura	
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	133.73
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	134.33
	Nilai Tukar Petani (NTPH)	99.55
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	117,07
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	134,73
	Nilai Tukar Petani (NTPR)	86,89
4	Peternakan	
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	122.37
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	127.97
	Nilai Tukar Petani (NTNP)	95.62
5	Perikanan	
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	147.20
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	129.30
	Nilai Tukar Petani (NTNP)	113.84
Provinsi Riau		
	Indeks Harga yang diterima Petani (It)	123.80
	Indeks Harga yang dibayar Petani (Ib)	133.55
	Nilai Tukar Petani (NTP)	92.70

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2019



Upaya peningkatan dilakukan berbagai pihak. Diantaranya oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan yang melakukan beberapa upaya terkait luas lahan dan produktivitas. Dari luas lahan yang diusahakan untuk tanaman pangan dan hortikultura setiap tahun mengalami penurunan baik karena alih fungsi lahan maupun penyebab lainnya.

Sementara dari segi produktivitas untuk tahun 2018 mengalami peningkatan produktivitas terutama untuk tanaman pangan dan perikanan. Selain itu harga komoditas pertanian khususnya tanaman pangan relatif menguntungkan bagi petani.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh OPD terkait dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan peningkatan NTP di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan produksi yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan
2. Peningkatkan nilai tambah produk dan akses informasi pasar yang berdaya saing dan berkelanjutan
3. Peningkatan penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Peningkatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
5. Peningkatan produksi tanaman perkebunan penghasil pangan
6. Meningkatkan penyuluh tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang maju dan berkelanjutan

Sedangkan kendala yang ditemui dalam mencapai kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Luas lahan untuk pengembangan budidaya padi di Provinsi Riau setiap tahun mengalami penurunan, hal ini disebabkan tekanan terhadap alih fungsi lahan sawah yang cukup besar
2. Ketersediaan benih tanaman pangan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang relatif masih belum siap, sehingga penanaman



- jadi tertunda dan tidak sesuai dengan jadwal tanam yang sudah ditetapkan.
3. Produktivitas tanaman pangan masih relatif rendah dan masih dibawah rata-rata produktivitas nasional yang disebabkan penggunaan input teknologi yang masih rendah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai
 4. Untuk pengembangan hortikultura hanya mengandalkan usaha masyarakat.dan belum dapat melakukan pengembangan dalam jumlah besar dan massal karena terbatas pada ketersediaan lahan dan minat masyarakat
 5. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena banyaknya tanaman tua rusak, penggunaan bahan tanaman yang tidak bermutu dan bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanganan pascapanen yang belum memadai serta lemahnya kelembagaan petani.
 6. Usaha untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah produk masih berjalan secara maksimal sehingga berdasarkan NTP, manfaat kegiatan budidaya pertanian belum memberikan porsi yang besar bagi pendapatan petani. Hal ini selain disebabkan karena produktifitas petani yang rendah, juga dipengaruhi oleh factor eksternal petani seperti fluktuasi harga, harga sarana produksi pertanian dan mekanisme pemasaran
 7. motivasi masyarakat terhadap pertanian bawang merah masih rendah, baru 4 kabupaten/kota yang menjadi daerah penghasil yaitu Kampar, Siak, Pekanbaru, dan Dumai, kualitas bawang merah masih rendah juga dipengaruhi oleh struktur tanah dan iklim daerah

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan) diukur Melalui Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rp 71.749.272.832,- atau 45,83% dari total pagu anggaran Rp 156.540.064.442,- artinya terdapat efisiensi sebesar 54,17% guna

mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja penyelesaian Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan) diukur Melalui Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) diantaranya :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
7. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



Gambar 3.9. Gubri H Wan Thamrin Hasyim di dampingi Bupati Rohil mengendarai traktor saat Panen Raya Padi, di Kepenghuluan Pematang Silek, Kec. Rimba Melintang – Rokan Hilir



SASARAN 10 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform* ; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Rumus yang digunakan untuk IKLH provinsi adalah:

$$\text{IKLH Provinsi} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Keterangan:

IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan tingkat Provinsi

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 3.26. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,10	63,93	106,37%	96,97%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



Secara umum Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas telah mencapai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 10 dilihat dari 1 indikator kinerja. Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah 63,93 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{IKLH Provinsi Riau} &= (30\% \times 50,50) + (30\% \times 89,91) + (40\% \times 54,51) \\ &= 63,93 \end{aligned}$$

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (2018), permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau dibedakan berdasarkan tiga indikator tersebut dan hasilnya sebagai berikut:

1. Masalah kualitas air:

Status mutu air 4 sungai besar yaitu Sungai Siak, Rokan, Indragiri dan Sungai Kampar dalam kondisi cemar berat. Keempat sungai ini mempunyai luas daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda tetapi permasalahan kualitas lingkungan yang sama yaitu kritis dan pencemaran.

2. Masalah tutupan lahan:

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang disajikan merupakan IKTL tahun 2017. Adapun masalah tutupan lahan yang terjadi di Provinsi Riau diakibatkan oleh meningkatnya laju alih fungsi lahan yang berakibat berkurangnya tutupan lahan.

3. Masalah kualitas udara:

Permasalahan kualitas udara berasal emisi udara sumber bergerak/tdk bergerak).

Adapun solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau kedepannya dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Masalah kualitas air:

Pembinaan terhadap industri dan penekanan terhadap izin pembuangan limbah cair agar lebih ketat



2. Masalah tutupan lahan:

Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal yang tidak produktif

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau mengalami perubahan setiap tahun dan katagori/level tergantung dari kualitas 3 (tiga) komponen diatas. Kecendrungan dan pola perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27. Perubahan IKLH Provinsi Riau dalam periode 2011-2018

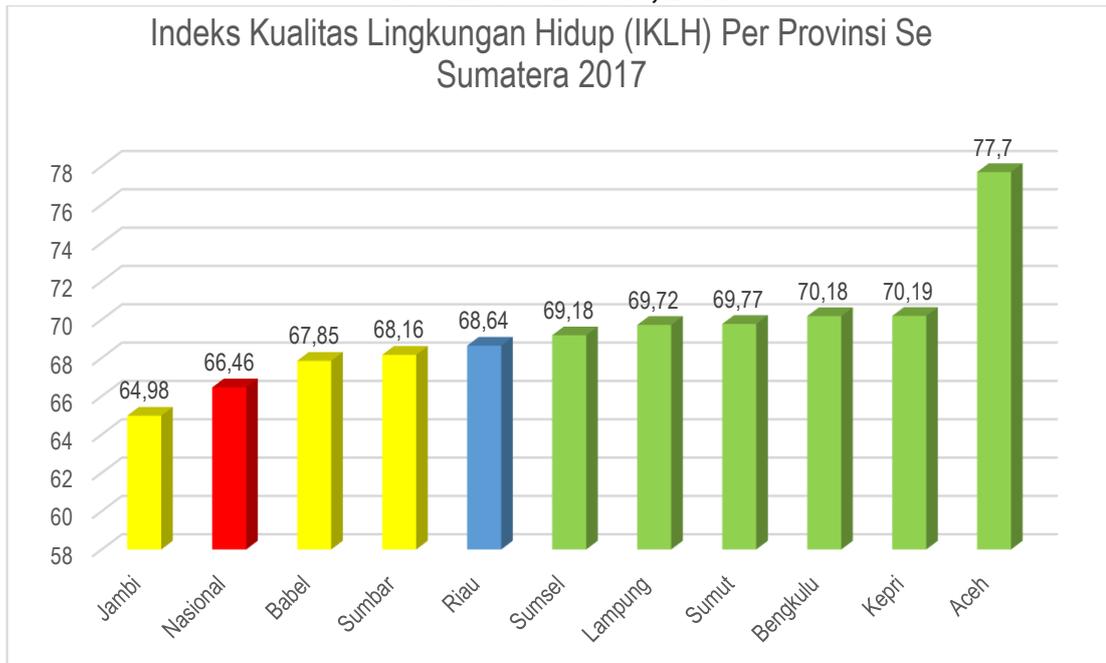
INDEKS	Tahun								Keterangan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Udara	67,06	51,91	52,89	60,30	-	72,40	90,90	89,91	
Air	55,60	54,30	48,71	7,53	47,65	50,75	65,23	50,50	
Tutupan Hutan	60,49	50,65	50,60	50,60	47,61	49,45	54,51	54,51*	*data 2017
IKLH	61,00	52,12	50,72	52,59	-	56,73	68,64	63,93	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)

Dalam kurun waktu 7 (tahun) tahun terjadi fluktuasi IKLH secara signifikan meskipun pada tahun 2014 indeks naik dari tahun 2013, mengindikasikan adanya kecendrungan kualitas udara, air dan tanah membaik. IKLH Provinsi Riau tahun 2013 sebesar 50,72 merupakan yang terendah di Pulau Sumatera dan kualitas lingkungan hidupnya masuk dalam katagori sangat. IKLH Provinsi Riau jauh dibawah IKLH rata-rata secara nasional yaitu 63,13.



Grafik 3.9. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup per Provinsi Sumatera, 2017



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa IKLH Provinsi Riau tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional, akan tetapi masih lebih dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Aceh. Hal ini terjadi karena IKA di Riau masih rendah dikarenakan masih terdapat sejumlah Sungai dalam kondisi tercemar berat, dan angka tutupan lahan di Riau yang masih sangat rendah.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau maka telah tercapai 96,97%, mengingat tipe perhitungan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 61,99.

Target Kualitas Lingkungan Hidup masih belum tercapai, kondisi ini disebabkan oleh :

1. Jumlah limbah rumah tangga penduduk dan pembangunan yang semakin meningkat akan menghasilkan limbah domestik yang mempengaruhi kualitas air.
2. Jumlah Industri yang membuang limbahnya ke badan air dari tahun ke tahun bertambah



3. Penegakan hukum yang belum optimal, sehingga para pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar aturan masih terjadi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau sebagai upaya perbaikan diantaranya adalah :

1. Pembinaan terhadap industri dan penekanan terhadap izin pembuangan limbah cair agar lebih ketat
2. Sosialisasi terhadap masyarakat jangan membakar lahan
3. Sosialisasi ke masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui kegiatan 3R
4. Penegakan hukum lingkungan

Beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator antara lain:

1. Terbatasnya tenaga teknis profesional yang menangani pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dan beberapa tenaga teknis yang terlatih mengalami mutasi ke dinas/instansi di luar lingkungan hidup.
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya kegiatan masih belum memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun solusi dari permasalahan ini adalah:

1. Penambahan pegawai khususnya yang memiliki spesifikasi S1 dan S2 yang berlatar belakang pendidikan seperti pertambangan dan geologi, selama ini sumber daya manusia (SDM) yang ada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau peningkatan kualitasnya hanya melalui kursus – kursus teknis seperti : kursus AMDAL, kursus pencemaran udara, kursus limbah B3 dll.
2. Perencanaan pemantauan kualitas air.
3. Penyusunan tim pemantauan kualitas lingkungan.
4. Penetapan sumber air (minimal 5 lokasi - 3 titik pantau, 2 (dua) kali/ tahun.
5. Pertemuan teknis tim pemantauan dalam rangka penyusunan disain pemantauan.
6. Pengambilan contoh air pada sumber air yang telah ditetapkan untuk dipantau.



7. Analisis laboratorium, verifikasi dan validasi data, analisis dan interpretasi data.
8. Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan disain penyebaran informasi dan penetapan status mutu air.
9. Melakukan inventarisasi hasil laporan kualitas udara ambien dari kab/kota.
10. Melakukan inventarisasi laboratorium pengukuran udara yang ada di wilayahnya.
11. Melakukan survey pendahuluan atau mengumpulkan data pada kawasan padat lalu lintas, permukiman dan industri di setiap kabupaten/ kota.
12. Menerima dan mengklarifikasi pengaduan sesuai dengan permasalahan serta kewenangan penanganan serta menindaklanjuti dan mempublikasikan hasil pengaduan.
13. Penambahan peralatan penunjang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara dan tanah diharapkan dari pihak – pihak pengambil keputusan dalam mengusulkan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau melakukan kegiatan penyempurnaan peralatan pemantau lingkungan tersebut.

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja Indeks lingkungan hidup adalah Rp 33.832.705.972,- atau 39,93% dari total pagu anggaran Rp 84.723.344.077,- artinya terdapat efisiensi sebesar 60,07% guna mencapai kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup diantaranya :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
6. Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
8. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan



Gambar 3.10. Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menerima Penghargaan Riau Bebas Asap dari BNPB Pusat

SASARAN 11 : MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING

Sasaran Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing diukur melalui Jumlah kunjungan wisatawan asing. Indikator jumlah kunjungan wisatawan asing adalah jumlah wisatawan yang berasal dari luar negeri yang mengunjungi Provinsi Riau. Tujuan mengukur indikator ini adalah mengetahui kondisi pariwisata di Provinsi Riau. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi Daerah tuan rumah, maupun Negara asal para turis. Salah satu motivasi utama sebuah daerah mempromosikan dirinya sebagai daerah



dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang.

Fungsi mengukur indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat kunjungan Provinsi Riau. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 11 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.28. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah kunjungan wisatawan asing	79.227,000	146.935	185,46%	166,89%

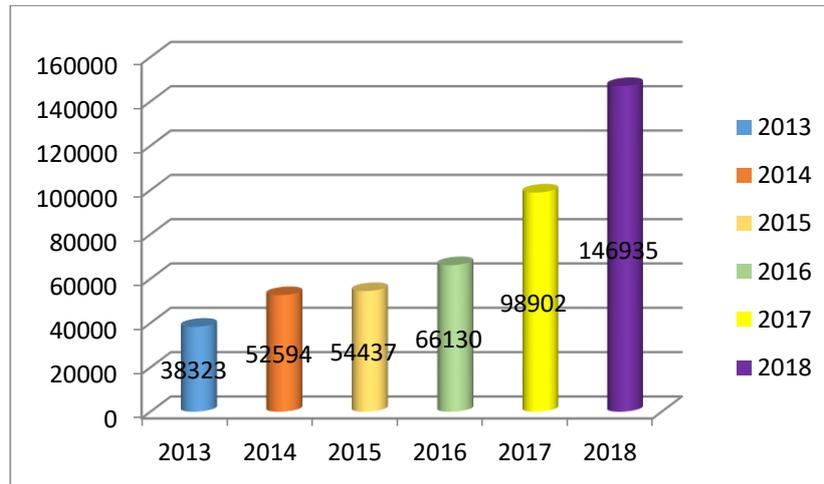
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Secara umum Sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing telah mencapai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 11 dilihat dari 1 indikator kinerja. Indikator kinerja Jumlah kunjungan wisatawan asing Tahun 2018 adalah 146.935 orang dengan capaian kinerja sebesar 185,46%. Pencapaian kinerja ini dapat dikatakan jauh melebihi target yang telah ditetapkan dalam artian Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah berhasil meningkatnya kinerjanya dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing di Provinsi Riau.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah terjadi peningkatan sebesar 45,19% artinya terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing karena pada tahun sebelumnya realisasi kunjungan wisatawan asing adalah 98.902 orang dengan capaian 140,27%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 166,89%, mengingat tipe perhitungan indikator ini bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 88.044 orang.



Grafik 3.10. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2018



Peningkatan capaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau melalui pelaksanaan berbagai upaya Pengembangan kerangka strategi Pemasaran Pariwisata dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab;
3. Menciptakan industry pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
4. Menciptakan sinergitas antara organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Proses pencapaian sasaran dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing tidak terlepas dari beberapa kendala sebagai berikut:



1. Aksesibilitas, saran dan prasarana yang kurang memadai di beberapa destinasi wisata;
2. Pentingnya membangun citra pariwisata yang berkelanjutan untuk mampu memberikan kesan positif dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung;
3. Ketatnya persaingan pasar di tingkat nasional;
4. Kurangnya penanaman jiwa kepariwisata bagi seluruh elemen masyarakat;

Adapun upaya pemecahan masalah urusan pariwisata dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bekerja dengan Dinas terkait untuk memperbaiki aksesibilitas, sarana dan prasarana destinasi wisata di Riau
2. Melakukan pemasaran pariwisata yang lebih berstrategi dan sinergitas, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas promosi yang telah ada guna terciptanya promosi pariwisata yang efisien dan efektif;
3. Peningkatan kualitas produk pariwisata baik dalam bentuk pelayanan, destinasi wisata, event maupun paket-paket wisata sehingga memiliki daya saing yang kuat

Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada tahun 2018 telah mengembangkan destinasi wisata di Provinsi Riau yang terdiri dari 4 destinasi wisata yaitu :

1. Destinasi Sungai paku di Kabupaten Kampar
2. Destinasi Taman Bunga Menara Lestari di Kabupaten Siak
3. Destinasi Kampung Selfi (Kampung Warna Warni) di Kabupaten Indragiri Hilir
4. Destinasi Bukit Suligi (Aliantan) di kabupaten Rokan Hulu)

Adapun penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian kinerja Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing adalah Rp 28.056.407.073,- atau 99,79% dari total pagu anggaran Rp 28.116.469.740 artinya terdapat efisiensi sebesar 0,21% guna mencapai kinerja tersebut.

Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing diantaranya :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata
4. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya



Gambar 11. Gubri H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Bupati, Wakil Bupati Kab Kuansing dan Forkopinda memukul Gong tanda Pembukaan Pesta Rakyat Kuantan Singingi “Festival Pacu Jalur Tradisional Tahun 2018”, di Lapangan Limuno Kuansing

SASARAN 12 : MENINGKATNYA NILAI INVESTASI

Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi diukur melalui Nilai Investasi PMDN dan PMA. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 12 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:



Tabel 3.29. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Nilai investasi	PMDN (triliun rupiah)	11.200,31	9.055,39	80,85%	78,58%
	PMA (juta US\$)	1.067,21	1032,88	96,78%	92,23%

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau, 2019

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 12 dilihat dari 2 indikator kinerja. Indikator Nilai investasi (PMDN) Tahun 2018 adalah Rp 9.055,39 triliun dengan capaian kinerja sebesar 80,85%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 adalah meningkat sebesar 2.310,49 triliun karena pada tahun sebelumnya realisasi nilai investasi PMDN adalah 6.744,90 triliun.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 78,58%, mengingat tipe perhitungan indikator Nilai investasi (PMDN) bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 11.523,46 triliun.

Sementara untuk indikator Nilai PMA (juta US\$) tahun 2018 adalah 1.032,88 US\$ dengan capaian kinerja mencapai 96,78%. Capaian ini menurun dari realisasi nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar 119,14 US\$ dari realisasi tahun 2017 adalah 1.152,02 US\$.

Pengertian dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan / atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA)



adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini DPMPTSP dalam meningkatkan realisasi investasi Provinsi Riau dengan dua cara pandang :

1. Meningkatnya daya Tarik investasi melalui promosi dalam dan luar negeri
 - Meningkatkan promosi investasi terpadu dan efektif melalui kerjasama dalam dan luar negeri
2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
 - Menyediakan regulasi dan deregulasi yang terkait dengan investasi
 - menyediakan kajian dan data yang mendukung investasi
 - membentuk tim investasi yang kondusif
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA
3. Meningkatkan promosi investasi terpadu dan efektif melalui kerjasama dalam dan luar negeri

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi investasi adalah sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya sosialisasi dan pengendalian penanaman modal, khususnya kegiatan yang dibiayai dengan APBD, sehingga masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui cara pengentrian realisasi investasi kedalam sistem;
- b. belum optimalnya fungsi sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem yang disiapkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, menyebabkan terkendalanya penerbitan perizinan berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Dalam *Online Single Submission* (OSS) pelaku usaha yang memperoleh izin tidak mendapatkan pekenanan untuk melakukan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.



Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan permasalahan penanaman modal di Provinsi Riau :

- a. Meningkatkan intensitas bimbingan dan penyuluhan dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online dengan cara mengundang pelaku usaha datang ke Klinik KLPM DPMPTSP Provinsi Riau serta meningkatkan monitoring melalui pertemuan koordinasi dengan pelaku usaha
- b. melaksanakan koordinasi bersama Kemenko Bidang Perekonomian dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengusulkan penyempurnaan sistem OSS kepada Kementerian Koordinator (Kemenko)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- c. Mengusulkan kepada BKPM agar mensyaratkan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke dalam sistem OSS

SASARAN 13 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi diukur Tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 13 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.30. Pengukuran Kinerja 2018 - Sasaran Strategis 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	% Perbandingan terhadap Capaian RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	3,73	2,34	62,73%	59,85%

Sumber Data : BPS Provinsi Riau, 2019

Secara umum capaian Sasaran Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi belum dicapai sesuai target. Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 dilihat dari 1 indikator kinerja. Indikator kinerja Tingkat pertumbuhan ekonomi Triwulan IV Tahun 2018 adalah 2,34 dengan capaian kinerja sebesar 62,73%.



Ekonomi Riau tahun 2018 tumbuh 2,34 persen, melambat dibanding tahun 2017 sebesar 2,68 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 8,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 9,25 persen.

Ekonomi Riau triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 1,28 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 9,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yang meningkat sebesar 6,31 persen.

Tabel 3.30. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

	<i>Lapangan Usaha</i>	<i>Triw IV-2018 terhadap Triw III-2018</i>	<i>Triw IV-2018 terhadap Triw IV-2017</i>	<i>Laju Pertumbuhan 2018</i>	<i>Sumber Pertumbuhan 2018</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,38	2,14	4,37	1,11
B.	Pertambangan dan Penggalan	-0,44	-5,14	-5,48	-1,13
C.	Industri Pengolahan	0,06	2,04	3,53	1,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,40	1,79	3,69	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,78	1,27	-0,23	0,00
F.	Konstruksi	3,96	3,97	5,46	0,44
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,14	5,87	6,47	0,59
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,93	2,58	3,27	0,03
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	4,56	4,67	0,02
J.	Informasi dan Komunikasi	2,58	6,89	5,79	0,05
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,75	4,79	4,64	0,04
L.	Real Estat	2,18	4,19	3,94	0,04
M,N.	Jasa Perusahaan	3,73	7,41	8,19	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	-0,89	0,98	0,02
P.	Jasa Pendidikan	-0,33	4,38	4,83	0,02
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,05	6,82	5,57	0,01
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	7,68	9,15	8,67	0,04
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	0,68	1,28	2,34	2,34

Sumber : BPS Riau, 2019



Ekonomi Riau triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 0,68 persen terhadap triwulan IV-2017 (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,68 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 1,75 persen.

Secara spasial, pada tahun 2018 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,04 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 59,85%, mengingat tipe perhitungan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (harga konstan tanpa migas) bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 3,91%.

Bila dilihat berdasarkan kategori, Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -5,43% dan Pengadaa Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -0,23%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada sektor Jasa lainnya sebesar 8,67% diikuti sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,19%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi global pada triwulan IV tahun 2018 ini melemah disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya terkait kebijakan negara Amerika yang menurunkan defisit perdagangannya. Sementara faktor yang lain dampak dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan IV berada pada angka 6,4 persen, dan angka ini merupakan titik terendah selama 10 tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi kedua negara besar Amerika dan Tiongkok ini sangat berdampak pada sejumlah negara termasuk salah satunya Indonesia. Provinsi Riau sebagai wilayah terbesar ke-5 di Indonesia dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhannya pada triwulan IV



melemah dan hanya mampu tumbuh diangka 1,28 persen dibanding triwulan IV tahun 2017 lalu.

Pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor unggulan seperti sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan sektor Pertanian. Namun tiga sektor unggulan ini tidak memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Riau pada Triwulan ke IV.

Sumber perlambatan utamanya diperkirakan dari melambatnya ekspor luar negeri akibat terkontraksinya pertumbuhan harga komoditas utama, serta gejolak perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap ekspor luar negeri dari Provinsi Riau. Kondisi perlambatan diperkirakan juga terjadi pada sektor pertanian sejalan dengan cuaca yang kurang kondusif, serta kontraksi sektor Pertambangan yang semakin dalam akibat natural declining.

Adapun upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 1) membangun persepsi positif terhadap iklim investasi melalui publikasi perkembangan kemajuan-kemajuan Riau melalui media komunikasi yang lebih luas. Perlu upaya meningkatkan *ease of doing business* melalui deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi, disertai dengan peningkatan informasi terkait kebijakan-kebijakan di daerah yang memberikan insentif khusus bagi para investor di Provinsi Riau.
- 2) peningkatan realisasi belanja modal yang dimonitor dan dievaluasi secara intensif. Selain itu, demi terlaksananya realisasi anggaran sesuai peruntukan, perlu dikembangkan mekanisme *punishment* bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- 3) penetapan lokasi trase tol Pekanbaru Bangkinang perbatasan Sumbar sebagai bagian dari tol Pekanbaru Bukittinggi Padang yang menurut perkembangan terkini konstruksinya akan dimulai dari sisi Riau, dari yang semula direncanakan dari sisi Sumatera Barat.



- 4) mendorong kerjasama dengan masyarakat/asosiasi usaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan berbagai kegiatan/event pariwisata berbasis alam/perkebunan yang tidak terlalu membutuhkan usaha yang begitu besar (low hanging fruit), seperti wisata petik durian asli Bangkinang/Bengkalis, wisata persawahan di Bungaraya, wisata edukasi perkebunan sawit, karet, dsb.

Kegiatan tersebut dikembangkan sejalan dengan berbagai event pariwisata/budaya berskala nasional dan internasional yang telah ada saat ini seperti Bakar Tongkang, Pacu Jalur, dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dipublikasikan melalui berbagai media pemasaran yang massive dan terpusat, termasuk di media sosial.

Sementara untuk jangka panjang, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) percepatan proyek pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, kelistrikan, pelabuhan, serta pengembangan kawasan industri yang sinergis dan terarah dengan pengembangan sektor prioritas di provinsi Riau.

Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Riau juga diperlukan, seperti penetapan lokasi (Penlok) dan dukungan pembebasan lahan trase jalan tol Padang Bukittinggi Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat, dan rel kereta api Rantau Prapat Duri Pekanbaru. Dalam hal pengembangan kawasan industri seperti di Dumai dan Tanjung Buton, dapat disediakan berbagai paket insentif agar dapat menarik investor, seperti perizinan pembangunan pabrik yang paralel dengan proses perizinan, diskon PBB dan BPHTB, dan berbagai insentif lainnya.

- 2) perlunya penyusunan roadmap pengembangan kemaritiman di Provinsi Riau mengingat potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Sampai dengan saat ini, masih belum terdapat industri pakan ikan sehingga biaya pengembangan perikanan di Riau menjadi lebih mahal.



- 3) mengoptimalkan pengembangan potensi wisata Riau, baik wisata budaya, religi, dan sejarah maupun wisata berbasis alam dan perkebunan, antara lain melalui percepatan perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendukung dan kondisi akomodasi agar lebih memadai, promosi dan buku panduan, serta penguatan Sumber Daya Manusia di sektor Pariwisata dan Jasa Pendukung.

3.1. REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 91,80% dari rencana pendapatan yang telah ditetapkan dengan rincian capaian pendapatan sebagai berikut:

1. PAD dapat direalisasikan sebesar Rp 3,639 triliun atau 91,80% dari target Rp 3,964 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan PAD tahun 2017 sebesar Rp 279 milyar atau 8,30%. Jika dilihat dari masing-masing komponen PAD terdapat dua komponen yang meningkat yakni penerimaan pajak daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sementara itu terdapat dua komponen yang mengalami penurunan yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2018 mengalami dinamika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana Perimbangan tahun 2018 sebesar Rp 4,82 triliun lebih, pada tahun 2017 meningkat Rp 288,53 milyar lebih atau 6,36 persen. sedangkan Lain-lain Pendapata Daerah yang sah tahun 2018 dari pendapatan hibah sebesar Rp 12,072 milyar meningkat Rp 8,994 milyar atau 292,20 persen dari tahun 2017;

Dalam hal tugas pembantuan yang diselenggarakan melalui APBN tahun 2018 sebesar Rp 171,44 milyar, Pemerintah Provinsi Riau dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp 154,15 milyar atau 89,91 persen dengan realisasi fisik sebesar 91,95 persen. Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau berasal dari lima Kementerian, yakni : Kementerian Pertanian; Sosial, Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat,



Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi; serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan meliputi enam OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 10,32 Trilyun. Dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.8,46 trilyun, atau capaian sebesar 82,02%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 5,77 Trilyun dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4,55 Trilyun. Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,20 Trilyun (90,22%). Sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp 3,25 Tilyun (71,61%).

Penganggaran Belanja Daerah tersebut diealisasi ke dalam 390 program dan 2.177 kegiatan yang dilaksanakan oleh 40 Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target kinerja Pemerintah Provinsi Riau yang tergambar dalam tabel berikut.



Tabel 3.32. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Efisiensi
				Keuangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	116.777.812.300	82.208.136.648	70,40%	29,60%
		panjang jalan dalam kondisi baik	1.160.568.507.794,87	891.656.123.826,95	76,83%	23,17%
		Rasio Elektrifikasi	93.428.559.709	16.139.749.620	17,27%	82,73%
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	943.839.057.927	765.683.904.904	81,12%	18,88%
		Angka harapan lama sekolah				
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	814.148.052.245	489.611.847.014	60,14%	39,86%
4.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio	190.301.936.941	174.797.875.706	91,85%	8,15%
5.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	40.871.722.530	17.941.156.006	43,90%	56,10%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Efisiensi
				Keuangan	Persentase	
6.	Terwujudnya good governance and clean government	Opini BPK	28.011.829.328	20.376.455.899	72,74%	27,26%
		Nilai Akuntabilitas				
		Skor LPPD	280.440.914.878	267.683.904.827	95,45%	4,55%
		Nilai Keterbukaan Informasi	30.797.349.575	22.578.975.825	73,31%	26,69%
		Nilai Reformasi Birokrasi	478.736.610.519	340.056.307.830	71,03%	28,97%
7.	Lestarnya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	22.750.817.679	9.655.522.642	42,44%	57,56%
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Budaya Melayu Sesuai Standar				
8.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	47.575.305.440	22.312.326.636	46,90%	53,10%
9.	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	156.540.064.442	71.749.272.832	45,83%	54,17%
		Nilai Tukar Petani (NTP)				



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Efisiensi
				Keuangan	Persentase	
10.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84.723.344.077	33.832.705.972	39,93%	60,07%
11.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah Kunjungan wisatawan asing	28.116.469.740	28.056.407.073	99,79%	0,21%
12.	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	11.176.775.286	6.101.750.991	54,59%	45,41%
		Nilai Investasi PMA (juta USD)				
13.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi				
Total Anggaran			4.532.826.196.348	3.238.399.636.268	71,61%	28,39%



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat fektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja Pemerintah Provinsi. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,67% atau Kategori **Baik** dengan realisasi anggaran sebesar 71,61%, Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 28,39%.

Pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang dicapai melalui realisasi anggaran yang minim, artinya terdapat efisiensi anggaran yang besar. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan rasionalisasi anggaran guna melaksanakan penggunaan anggaran pada program-program prioritas Pemerintah.

Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan secara tidak langsung harus mampu mensejahterakan masyarakat Riau. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka semakin rendah tingkat efisiensinya, sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka semakin tinggi efisiensi anggaran yang dilakukan.

Adapun dalam rangka efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas;
2. Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk kegiatan yang tidak terhindarkan;
3. Untuk kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi sedapat mungkin menggunakan sarana teknologi informasi untuk berkomunikasi antar wilayah;
4. Pengelolaan rapat pembahasan yang tepat waktu dan terstandardisasi (antara lain kejelasan durasi rapat, tujuan rapat, dan penetapan peserta rapat yang berkompeten);
5. Pembatasan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dan narasumber bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau khususnya tim kerja dan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.



BAB
4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Riau disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Provinsi Riau, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator, Sasaran Strategis dan capaian Misi.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 7 (tujuh) indikator capaiannya Sangat Baik, sedangkan 13 (tiga belas) indikator capaiannya Baik, 2 (dua) indikator capaiannya Kurang, 2 (dua) indikator tidak dapat diukur capaiannya karena datanya tidak tersedia (n/a). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2018 adalah sebesar **89,67%** atau kategori **Baik**.

Kesimpulan ringkas atas kinerja 13 (tiga belas) Sasaran Strategis, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar mendapat kategori **Baik** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 82,02%. Pencapaian ini dilihat dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut : persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum (74,66%); panjang jalan dalam kondisi baik (65,97%) dan rasio elektrifikasi (105,59%).



2. Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan mendapat kategori **Baik** dengan rata-rata capaian sebesar 99,03%. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Angka rata-rata lama sekolah (101,04%) dan Angka harapan lama sekolah (97,02%).
2. Sasaran 3: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat mendapat kategori **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 99,52%.
3. Sasaran 4 : Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat mendapat kategori **Baik** dengan capaian kinerja sebesar 93,66%. Pencapaian ini dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Tingkat kemiskinan (83,62%) dan gini rasio (105,71%).
4. Sasaran 5: Menurunnya angka pengangguran, mendapat kategori **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar 107,19%.
5. Sasaran 6 : Terwujudnya *good governance and clean government* mendapat kategori **Sangat Baik** dengan capaian kinerja sebesar 107,19%. Pencapaian ini dilihat dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu : Opini BPK (100%), Nilai Akuntabilitas (95,73%), Skor LPPD (76,47%), Nilai Keterbukaan Informasi (97,72%), Nilai Reformasi Birokrasi (133,54%).
6. Sasaran 7 : Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada indikator Jumlah karya seni budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni) tidak dapat dilaksanakan dan penerapan kurikulum muatan lokal berbasis budaya melayu akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019.
7. Sasaran 8 : Meningkatnya kerukunan hidup beragama mendapat kategori **Baik** dengan capaian kinerja mencapai 100%, artinya persentase penyelesaian konflik antar umat beragama yang terjadi di Provinsi Riau mencapai 100%.
8. Sasaran 9 : Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) mendapat kategori **Baik** dengan capaian kinerja mencapai 89,01%, pencapaian ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (90,19%) dan Nilai Tukar Petani (87,83%).



9. Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup mendapat kategori **Sangat Baik** dengan capaian kinerja mencapai 106,37%. Capaian kinerja ini dilihat dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup.
10. Sasaran 11 : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing mendapat kategori **Sangat Baik** dengan capaian kinerja mencapai 185,46%. Capaian kinerja ini dilihat dari indikator jumlah kunjungan wisatawan asing.
11. Sasaran 12 : Meningkatnya nilai investasi mendapat kategori mendapat kategori **Baik** dengan capaian kinerja mencapai 88,82%. Pencapaian kinerja ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Nilai investasi PMDN (80,85%) dan nilai investasi PMA (96,78%).
12. Sasaran 13 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi mendapat kategori **Cukup** dengan capaian kinerja hanya mencapai 62,73%.

Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD sesuai dengan pagu anggaran pada APBD Provinsi Riau Tahun 2018. Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dicapai diantaranya Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni) dan Jumlah Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya melayu , hal ini terjadi dikarenakan untuk melaksanakan pendaftaran HAKI dan penetapan HAKI membutuhkan waktu 4 s/d 18 bulan untuk penetapannya. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kebudayaan telah menginventarisir Karya Seni Budaya yang akan didaftarkan HAKI pada 2018. Sementara untuk penerapan kurikulum Budaya Melayu Riau akan dilakukan pada tahun ajaran 2018/2019. Akan tetapi pada tanggal 25 Juni 2018 Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman telah mencanangkan penguatan muatan lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau sebagai kurikulum yang akan diterapkan oleh masing-masing sekolah di Provinsi Riau.

Pada Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau belum mencapai target. Hal ini terjadi karena ekonomi Provinsi Riau tahun 2018 tumbuh 2,34%, melambat dibanding tahun 2017 sebesar 2.68 dan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 3,73%. Pertumbuhan



ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor unggulan seperti sector pertambangan dan penggalan, industri pengolahan dan sektor pertanian. Namun tiga serktor ini tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV. Sumber perlambatan utamanya diperkirakan dari melambatnya ekspor luar negeri akibat kontraksinya pertumbuhan harga komoditas utama, serta gejolak perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap ekspor luar negeri dari Provinsi Riau.

Kekurangan yang terjadi selama tahun 2018 telah diintertarisir dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja pada tahun 2019 mendatang. Sasaran program yang belum tercapai akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau dapat dicapai. Dari hasil Evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau dapat disimpulkan.

4.2. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Mendatang

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang diantaranya dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pengoptimalisasian program kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran stategis Pemerintah Provinsi Riau;
2. Menguatan sektor-sektor unggulan dan potensial di Provinsi Riau dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan Tim SAKIP Provinsi Riau dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
4. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Riau yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan.



5. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
6. Mendorong percepatan sistem pelaksanaan penerapan Kurikulum Budaya Melayu Riau di Sekolah.
7. Peningkatan Sistem Birokrasi pada Pemerintahan Provinsi Riau.
8. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja Jumlah Karya Cipta Seni Budaya yang dihasilkan (HAKI Karya Seni), dalam rangka pencapaian kinerja yang maksimal.



GUBERNUR RIAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Jabatan : GUBERNUR RIAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru,

2018


GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum (%)	91,65
		Panjang jalan dalam kondisi baik	1.615,08
		Rasio Elektrifikasi	85,83
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,67
		Angka harapan lama sekolah (Tahun)	13,43
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	71,33
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan	Tingkat kemiskinan (%)	6,35
		Gini Rasio	0,35
5	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,68
6	Terwujudnya <i>good governance and clean goverment</i>	Opini BPK	WTP
		Nilai akuntabilitas	BB
		Skor LPPD	3,53
		Nilai keterbukaan informasi	46,49
		Nilai Reformasi Birokrasi	39,60
7	Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	60,00
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	150,00
8	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama (%)	100
9	Meningkatnya pembangunan sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	24,88
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,55
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,10
11	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing	Jumlah kunjungan wisatawan asing (orang)	79,227
12	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	11.200,31
		Nilai investasi PMA (juta USD)	1.067,21
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,73

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.955.861.969.494,00	APBD
PENDIDIKAN	665.264.404.826,00	
Program Pendidikan Menengah	549.213.600.566,00	
Program Pendidikan Khusus Layanan Khusus	43.890.299.230,00	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	71.663.802.630,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	496.702.400,00	
KESEHATAN	146.708.267.625,00	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.346.223.000,00	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8.043.316.304,00	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	6.770.583.940,00	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.272.642.000,00	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	7.480.735.100,00	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	263.795.400,00	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru Rumah sakit Mata	209.108.400,00	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.030.384.900,00	
Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	15.222.820.581,00	
Program Pengendalian Penyakit tidak Menular	702.374.500,00	
Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	7.837.502.060,00	
Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	444.426.600,00	
Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan Lingkungan	6.972.880.500,00	
Program Pembiayaan Kesehatan	87.383.338.340,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	194.136.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	176.050.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	357.950.000,00	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	298.465.504.497,00	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.304.032.125,00	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	256.717.600,00	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru Rumah sakit Mata	57.201.153.672,00	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.310.003.200,00	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	230.000.000.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	134.241.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.738.291.900,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.521.065.000,00	
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	81.298.936.106,00	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	497.750.000,00	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.115.785.200,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	448.396.300,00	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru Rumah sakit Mata	56.393.118.306,00	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	17.940.535.000,00	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.187.724.500,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	263.345.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.452.281.800,00	
RUMAH SAKIT PETALA BUMI	23.653.027.400,00	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.097.514.600,00	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	278.784.000,00	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru Rumah sakit Mata	5.264.742.000,00	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	13.000.000.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	303.500.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.658.486.800,00	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	720.053.560.900,00	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	145.137.893.000,00	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	487.957.452.000,00	
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	97.377.600,00	
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	86.310.181.500,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	250.000.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	275.656.800,00	
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA	517.671.100,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	460.171.100,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.500.000,00	
SOSIAL	9.037.096.840,00	
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	986.351.440,00	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	753.141.600,00	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	294.079.000,00	
Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	1.045.110.800,00	
Program Pelayanan Sosial melalui Pantti	5.818.414.000,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	100.000.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.863.500.200,00	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10.790.600.200,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.900.000,00	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	107.167.621.652,00	APBD
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.456.794.600,00	
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	147.000.000,00	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	3.960.880.600,00	
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	296.289.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.725.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.900.000,00	
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	27.747.136.410,00	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	8.556.406.600,00	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.337.230.800,00	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	4.862.522.160,00	
Program Transmigrasi Lokal	2.625.602.850,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	73.374.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	292.000.000,00	
KETAHANAN PANGAN	7.572.649.680,00	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	6.753.614.480,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	699.285.200,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	104.750.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,00	
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.730.455.900,00	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.410.795.100,00	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	118.393.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	174.500.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.767.800,00	
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	17.789.203.381,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.555.000,00	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	17.589.648.381,00	
PERHUBUNGAN	8.706.730.400,00	
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	7.658.234.600,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	85.000.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	341.695.800,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	229.800.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	392.000.000,00	
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	4.798.765.000,00	
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	86.100.000,00	
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	3.251.079.900,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	819.716.400,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	241.868.700,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400.000.000,00	
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.237.060.800,00	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	563.079.400,00	
Program Peningkatan Iklim Investasidan dan Realisasi Investasi	1.513.614.400,00	
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana	160.367.000,00	
KEBUDAYAAN	14.234.985.779,00	
Program Pengembangan Nilai Budaya	6.258.987.900,00	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4.388.475.400,00	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.408.150.079,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114.372.400,00	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.285.876.651,00	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	966.975.200,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.861.451,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	69.500.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73.540.000,00	
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL,	3.348.250.650,00	
Program Keluarga Berencana	1.190.598.980,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	137.944.270,00	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.019.707.400,00	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.259.712.401,00	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	3.900.000.000,00	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2.051.662.401,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	531.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.650.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127.050.000,00	

PROGRAM URUSAN PILIHAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	308.563.927.698,00	APBD
KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.446.514.500,00	
Program Perencanaan Tata Ruang	400.000.000,00	
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	880.526.200,00	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	8.942.294.400,00	
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	11.334.337.300,00	
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Produksi Perikanan	3.693.876.800,00	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	184.493.200,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	973.586.600,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.400.000,00	
TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	59.308.877.850,00	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.668.296.200,00	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	826.906.200,00	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	181.100.400,00	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	19.625.200.100,00	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	35.666.329.550,00	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.111.045.400,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	76.833.761.800,00	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.426.219.000,00	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	8.789.986.100,00	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	65.157.276.300,00	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.131.272.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	138.200.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	190.808.400,00	
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	86.526.866.909,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	37.029.110.609,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	48.087.577.800,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	403.250.200,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	150.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	856.928.300,00	
PARIWISATA	51.267.453.144,00	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.017.137.500,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3.627.988.200,00	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata	2.840.418.700,00	
Program Pengembangan Ekonom Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	1.354.639.190,00	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	22.430.861.804,00	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	18.276.286.150,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	463.298.700,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	194.890.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.932.900,00	
PERINDUSTRIAN	6.806.177.625,00	
Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.210.344.181,00	
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1.990.852.204,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	259.796.440,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	250.000.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.184.800,00	
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.374.275.870,00	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	369.598.770,00	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	860.661.600,00	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	144.015.500,00	
PENUNJANG URUSAN	48.164.281.798,00	APBD
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	9.929.746.400,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	1.705.743.500,00	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.507.402.900,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53.000.000,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163.600.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00	
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.896.028.265,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	81.320.000,00	
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.944.813.865,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	529.031.400,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	340.863.000,00	
PENDAPATAN DAERAH	4.872.551.675,00	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.693.765.675,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	178.786.000,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.095.678.200,00	
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3.214.277.400,00	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	1.837.400.800,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.000.000,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	471.216.400,00	
Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	436.216.400,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000,00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	429.176.300,00	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	215.543.000,00	
Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data	135.678.300,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.200.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.755.000,00	
KEPEGAWAIAN DAERAH	9.315.186.658,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	8.306.635.058,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	460.731.400,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	547.820.200,00	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.074.603.900,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	426.545.100,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.500.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	593.558.800,00	
PENGHUBUNG	80.094.000,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	80.094.000,00	
PENDUKUNG	55.987.365.275,00	APBD
SEKRETARIAT DAERAH	55.574.528.275,00	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	234.438.000,00	
Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153.204.000,00	
Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	555.071.400,00	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.237.229.300,00	
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	8.862.944.675,00	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	277.623.100,00	
Program Kerjasama Pembangunan	2.908.926.100,00	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.119.153.600,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	219.031.700,00	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penataan Kelembagaan	654.077.400,00	
Program Penataan Tatalaksana	442.779.450,00	
Program Reformasi Birokrasi	277.335.300,00	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah	1.251.339.000,00	
Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama	33.595.983.500,00	
Program Pelayanan Publik	425.368.250,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	484.827.500,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	875.196.000,00	
SEKRETARIAT DPRD	412.837.000,00	
Program Pengembangan Data/Informasi	261.437.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	151.400.000,00	
PENGAWASAN	1.045.390.000,00	APBD
INSPEKTORAT	1.045.390.000,00	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	146.576.000,00	
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	49.600.000,00	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	212.315.600,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	322.430.800,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	133.720.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.747.600,00	

Pekanbaru, Januari 2018

GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

SURAT PERNYATAAN
REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Riau Tahun 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi kinerja yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Provinsi Riau Tahun 2018 yang sudah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, pengecualiaan pada masalah yang akan kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 tidak disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan diketahui bahwa penyusunan LKj IP Tahun 2018 telah cukup memadai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Penyusunan telah dilakukan oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi terkait yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 144/II/2017.
- (2) Penyajian setiap sasaran yang disajikan telah didukung dengan data resmi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana.
- (3) Penyampaian data dan informasi dari unit kerja penyusunan LKj telah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan
- (4) Penyajian data kinerja atas Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik, namun masih dibutuhkan beberapa perbaikan dalam hal format, mekanisme penyusunan dan penyajian substansi laporan.

Format penyusunan LKj IP belum seluruhnya memiliki sistematika penyajian capaian kinerja yang dapat menjelaskan keterkaitan antara indikator, target, realisasi dan capaian kinerja dengan program/kegiatan, kebutuhan anggaran dan realisasi keuangannya. Disamping itu belum seluruh perbandingan capaian kinerja diuraikan dalam uraian penulisan dan masih terdapat penyajian realisasi dan capaian indikator kinerja yang belum disajikan karena data tidak ada/lengkap.

Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan setiap sasaran yang disajikan telah didukung dengan data resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun penyajian LKj IP bukanlah kompilasi LKj IP unit kerja dibawahnya, akan tetapi merupakan laporan atas Perjanjian Kinerja Gubernur Riau Tahun 2018 yang disusun berdasarkan data capaian Laporan Kinerja OPD.

Dalam hal substansi, masih terdapat sasaran di dalam LKj IP yang belum sesuai dengan sasaran yang ada di dalam Perjanjian Kinerja, sebagian indikator kinerja yang disajikan di dalam LKj IP. belum sesuai dengan indikator kinerja yang ada di dalam RPJMD, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



Drs. EVANDES FAJRI, Ak, CA
Pembina Utama Muda
NIP. 19641207 199203 1 010